

YAYASAN LEMBAGA PENDIDIKAN ISLAM DAERAH RIAU
UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN POLITIK

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT DI KELURAHAN MERANTI PANDAK
SKRIPSI

Diajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata Satu Ilmu Pemerintahan
Pada Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik
Universitas Islam Riau



KHAIRUN NISA JASMAN

167310521

PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN
PEKANBARU

2020

UNIVERSITAS ISLAM RIAU

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PEMBIMBING

Nama : Khairun Nisa Jasman
NPM : 167310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S1)
Judul Penelitian : Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak

Format sistematika dan pembahasan masing-masing bab dan sub bab dalam penelitian ini telah dipelajari dan dinilai relatif telah memenuhi ketentuan- ketentuan normatif dan kriteria metode penelitian ilmiah, oleh karena itu dinilai layak serta dapat disetujui untuk diuji dalam sidang ujian Komprehensif.

Pekanbaru, Oktober 2020

Turut Menyetujui,

Program Studi Ilmu Pemerintahan

Ketua

Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si
M.I.P

Pembimbing



Data Wardana, S.Sos.,

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PERSETUJUAN TIM PENGUJI

Nama : Khairun Nisa Jasman
NPM : 167310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak

Naskah Skripsi ini secara keseluruhan dinilai, relatif telah memenuhi ketentuan-ketentuan metode penelitian ilmiah. Oleh karena itu Tim Penguji Ujian Komprehensif Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik dapat menyetujui dan menerimanya untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh Gelar Sarjana.

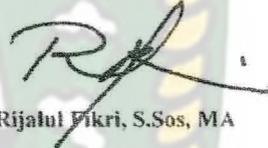
Pekanbaru 1 Desember 2020

Ketua



Data Wardana, S.Sos, M.IP

Sekretaris



Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Mengetahui

Wakil Dekan 1



Indra Safri, S.Sos, M.Si

Anggota



Dr. Renggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

BERITA ACARA UJIAN KONPREHENSIF SKRIPSI

Berdasarkan Surat Keputusan Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Nomor: ~~14~~YUIR-Fs/Kpts/2020 tanggal 15 Desember 2020 maka dihadapan Tim Penguji pada hari ini, Kamis tanggal 16 Desember 2020 jam 09.00 – 10.00 Wib, bertempat di ruang sidang Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Riau Pekanbaru telah dilaksanakan ujian konprehensif skripsi atas mahasiswa:

N a m a : Khairun Nisa Jasman
N P M : 167310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Strata Satu (S.1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak.

Nilai Ujian : Angka : " 80.4 " ; Huruf : " A- "
Keputusan Hasil Ujian : Lulus / Tidak Lulus / Ditunda
Tim Penguji :

No	Nama	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Data Wardana, S.Sos., M.IP	Ketua	1. 
2.	Rijalul Fikri, S.Sos., MA.	Sekretaris	2. 
3.	Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si.	Anggota	3. 

Pekanbaru, 16 Desember 2020
An. Dekan


Indra Sari, S.Sos., M.Si.
Wakil Dekan I Bid. Akademik



UNIVERSITAS ISLAM RIAU
FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Khairun Nisa Jasman
NPM : 167310521
Program Studi : Ilmu Pemerintahan
Jenjang Pendidikan : Starta Satu (S1)
Judul Skripsi : Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak

Naskah Skripsi ini benar telah dilakukan perbaikan dan penyempurnaan oleh Mahasiswa bersangkutan sesuai dengan koreksi dan masukan Tim Penguji dan dinilai telah memenuhi persyaratan administrasi dan akademis, oleh karena itu dapat disyahkan sebagai sebuah karya ilmiah.

Pekanbaru 1 Desember 2020

Ketua



Data Wardana, S.Sos, M.IP

Sekretaris



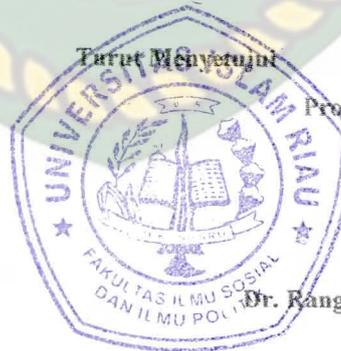
Rijalul Fikri, S.Sos, MA

Wakil-Dekan 1



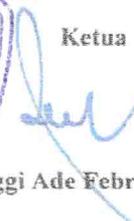
Indra Safri, S.Sos, M.Si

Turut Menyetujui



Prodi Ilmu Pemerintahan

Ketua



Dr. Ranggi Ade Febrian, S.IP., M.Si

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DI KELURAHAN MERANTI PANDAK

ABSTRAK

KHAIRUN NISA JASMAN

167310521

Kata Kunci : Analisis, Pelaksanaan Tugas

Penelitian ini tentunya berdasarkan latar belakang yang dikemukakan terkait program pembangunan, untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan tugas dalam program pembangunan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, di Kelurahan Meranti Pandak, Kota Pekanbaru, yang dimana dalam penelitian ini terdapat permasalahan atau terindikasi yaitu : 1. Kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sudah direncanakan sehingga masih banyaknya masyarakat yang kurang paham terkait manfaat pembangunan yang dilakukan. 2. Masih sering terjadinya banjir tahunan yang disebabkan curah hujan deras dikarenakan tidak adanya parit yang memadai. 3. Masih kurangnya pengendalian dan perawatan infrastruktur sehingga terjadinya kerusakan-kerusakan seperti kerusakan jalan dan hilangnya lampu-lampu jalan yang disebabkan oknum yang tidak bertanggung jawab, dalam penelitian ini untuk mengetahui tujuan, apakah pelaksanaan tugas oleh LPM di Kelurahan Meranti Pandak, Kota Pekanbaru sukses, terkait hambatan apa saja yang diperlukan dan juga golongan apa saja yang mendapatkan program pembangunan terkait pelaksanaan tugas oleh LPM itu sendiri. Selanjutnya tipe penelitian yang peneliti gunakan adalah tipe penelitian deskriptif dengan metode kualitatif. Karena penelitian ini menganalisa tentang pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terkait hal pembangunan di Kelurahan Meranti Pandak. Teknik yang digunakan untuk mengumpulkan data dalam penelitian ini adalah wawancara, observasi, dan juga dokumentasi dengan menyertakan hasil analisis data yang didapat serta Teknik yang berbeda dari beberapa sumber dan hasil dari kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa semua indicator terkait pelaksanaan tugas LPM dalam pelaksanaannya kurang efisien dan efektif.

ANALYSIS OF TASKS IMPLEMENTATION OF COMMUNITY DEVELOPMENT INSTITUTIONS IN MERANTI PANDAK VILLAGE

ABSTRACT

KHAIRUN NISA JASMAN

167310521

Keywords: Analysis, Task Execution

This research is of course based on the background put forward related to development programs, to find out the extent of the process of implementing tasks in the development program by the Community Empowerment Institution, in Meranti Pandak Village, Pekanbaru City, where in this study there are problems or indications, namely: 1. Lack of socialization to the public regarding the development that has been planned so that there are still many people who do not understand the benefits of the development being carried out. 2. There is still frequent occurrence of annual flooding due to heavy rainfall due to the absence of adequate ditches. 3. There is still a lack of control and maintenance of infrastructure so that damages such as road damage and loss of street lights are caused by irresponsible persons, in this study to determine the purpose, whether the implementation of tasks by LPM in Meranti Pandak Village, Pekanbaru City was successful, related to what obstacles are needed and also what groups get development programs related to the implementation of tasks by the LPM itself. Furthermore, the type of research that researchers use is descriptive type research with qualitative methods. Because this study analyzes the implementation of the tasks of the Community Empowerment Institution related to development in Meranti Pandak Village. The techniques used to collect data in this study are interviews, observations, and also documentation by including the results of data analysis obtained and different techniques from several sources and the results of the conclusions. Based on the research results, it can be concluded that all indicators related to the implementation of LPM duties in their implementation are less efficient and effective.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullai Wabarakatuh

Puji dan syukur atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan kekuatan dan semangat dalam menyelesaikan Skripsi ini yang berjudul “**Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak**”. Skripsi ini tentunya diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan dalam mengikuti ujian komprehensif untuk memperoleh gelar Strata satu sarjana Ilmu Pemerintahan pada Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Universitas Islam Riau.

Pada kesempatan yang baik ini tak lupa pula penulis menyampaikan ribuan terimakasih yang setulus-tulusnya baik secara langsung maupun tidak langsung kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis memperoleh masukan-masukan untuk Skripsi ini. Penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan-kekurangan dalam penulisan skripsi ini, untuk itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang sifatnya membangun guna kebaikan skripsi ini dimasa yang akan datang. Untuk itu izinkanlah penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang setulus-tulusnya kepada :

1. Rektor Universitas Islam Riau Bapak Prof.Dr.Syafrinaldi.,SH.,MH yang telah memberikan, menyediakan fasilitas dan memberikan kesempatan kepada penulis dalam membina ilmu pada lembaga pendidikan yang Bapak pimpin.

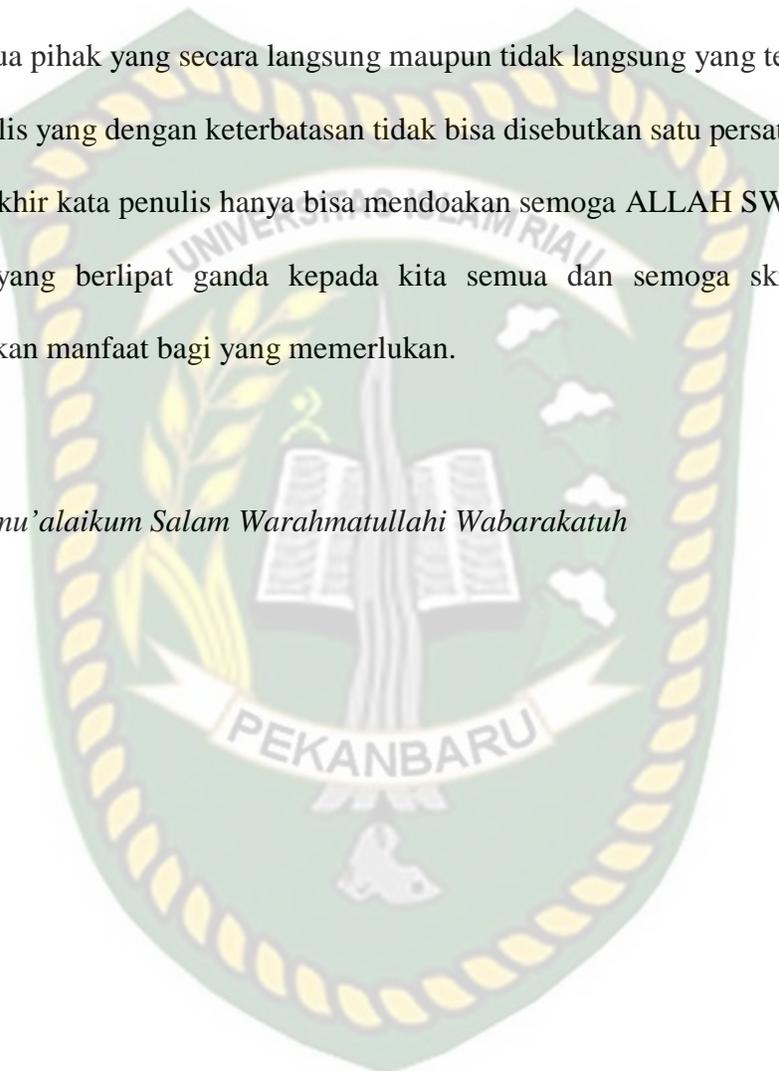
2. Bapak Dekan Fisipol Universitas Islam Riau Bapak Moris Adidi
Yogia.,S.,Sos.,M.,Si yang telah memfasilitasi untuk berjuang menggapai gelar dilembaga yang Bapak pimpin.
3. Bapak Budi Muliando,S.IP.,M.Si selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan serta jajaran dosen lainnya yang telah mengabdikan memberikan ilmu kepada kami.
4. Bapak Data Wardana,S.,IP.,M.,Ip sebagai Dosen Pembimbing yang senantiasa mengarahkan, mengajarkan dan sehingga Usulan Penelitian ini sesuai harapan yang diinginkan.
5. Seluruh Staff Karyawan/i yang telah melayani dan membantu penulis menyelesaikan segala administrasi serta Perpustakaan yang telah memberikan ruang penulis untuk menggali referensi sebagai acuan usulan penelitian.
6. Secara khusus penulis mengucapkan terima kasih dan penghormatan yang sangat besar kepada Orang Tua tercinta Ayahanda Jasman dan Ibunda Nur dan kakak, abang dan adik saya serta semua keluarga yang tidak hentinya mendoakan yang tidak ternilai harganya yang banyak memberikan semangat dan motivasi dan limpahan kasih sayang yang tiada hentinya untuk menyelesaikan studi dan memperoleh gelar yang penulis impikan.
7. Kepada Aldo Saputra yang selalu mendukung memberikan semangat, dukungan dan membuat saya termotivasi untuk dapat sesegera menyelesaikan pendidikan dibangku perkuliahan.
8. Terimakasih kepada teman-teman kelas IP F Angkatan 2016 yang telah banyak memberikan dukungan dan support dan bekerja sama dalam perkuliahan dan

teman-teman saya Satya Renata, Hafiz Saputra Hasan, Qurnia Jiwatama, Kasnia Hati Bulele, Siti Zubaidah, Hasti Nur Ramadhani, dan Rhoimah, dan DKK yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

9. Semua pihak yang secara langsung maupun tidak langsung yang telah membantu penulis yang dengan keterbatasan tidak bisa disebutkan satu persatu.

Akhir kata penulis hanya bisa mendoakan semoga ALLAH SWT memberikan balasan yang berlipat ganda kepada kita semua dan semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi yang memerlukan.

Waasalamu'alaikum Salam Warahmatullahi Wabarakatuh



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	17
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	17
BAB II STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR	19
A. Studi Kepustakaan.....	19
B. Penelitian Terdahulu	53
C. Kerangka Pikir	54
D. Konsep Operasional	56
E. Operasional Variabel	57
F. Teknik Pengukuran	58
BAB III METODE PENELITIAN	61
A. Tipe Penelitian	61
B. Lokasi Penelitian.....	61
C. Informan Penelitian.....	62
D. Teknik Penentuan Informan dan Key Informan.....	63

E. Jenis Dan Sumber Data.....	64
F. Teknik Pengumpulan Data.....	64
G. Instrumen Penelitian.....	65
H. Teknis Analisis Data.....	67
I. Jadwal Kegiatan Penelitian.....	68
J. Rencana Sistematika Laporan Skripsi.....	69
BAB IV DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN.....	71
A. Gambaran Umum Kelurahan Meranti Pandak.....	71
B. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Meranti Pandak.....	77
C. Biodata Pegawai Kelurahan Meranti Pandak.....	78
BAB V HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHAN.....	80
A. Identitas Informan.....	80
B. Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru	8
4	
BAB VI PENUTUP.....	97
A. Kesimpulan.....	97
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	100
LAMPIRAN.....	103

DAFTAR TABEL

TABEL I.1	Program Pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak 16	
TABEL II.1	Pendekatan Jurnal Terdahulu.....	53
TABEL II.2	Operasional Variabel	57
TABEL III.1	Jadwal Dan Waktu Penelitian	68
TABEL IV.1	Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir	72
TABEL IV.2	Jarak dari Kelurahan ke Ibukota Kecamatan, Ibukota kabupaten dan Ibukota Provinsi I Kabupaten/ Kota 72	
TABEL IV.3	Pembagian RT/RW Kecamatan Rumbai Pesisir.....	72
TABEL IV.4	Luas Wilayah Kelurahan Meranti Panda.....	74
TABEL IV.5	Keadaan Kependudukan Wilayah Kelurahan Meranti Pandak	75
TABEL IV.6	Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Rukun Warga (RW) Tahun 2020 75	
TABEL IV.7	Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020 7	
TABEL IV.8	Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Tahun 2020	77
TABEL V.1	Jenis Kelamin Informan.....	81
TABEL V.2	Pendidikan Informan.....	81
TABEL V.3	Umur Responden	82

TABEL V.4 Program Pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak 83



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau

DAFTAR GAMBAR

GAMBAR I.1	Struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat..	15
GAMBAR II.1	Kerangka Pikir.....	55
GAMBAR IV.1	Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Meranti Pandak....	77



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintahan Daerah dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen pada Bab IV pasal 18 ayat 3 dikatakan, 'Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota memiliki Dewan Perwakilan Rakyat daerah, yang anggota-anggotanya dipilih melalui pemilihan umum. Selanjutnya tentang pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dikatakan pula bahwa, Gubernur, Bupati dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten, dan kota. Dengan kata lain pemerintahan daerah adalah perangkat pemerintah daerah beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Maka, pemerintahan daerah provinsi adalah Gubernur beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi. Sedangkan pemerintahan daerah kabupaten/kota adalah bupati/walikota beserta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota.

Urusan Pemerintahan dimana kekuasaan pemerintahannya menjadi kewenangan Presiden yang pelaksanaannya dilakukan oleh kementerian Negara dan penyelenggara Pemerintah Daerah tentunya berfungsi untuk melindungi, melayani, memberdayakan, dan juga menjamin kesejahteraan masyarakat. Otonomi yaitu hak, serta wewenang dan kewajiban daerah otonom dalam mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan serta kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah ditetapkan untuk mengganti Undang-Undang 32 tahun 2004 yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Muatan Undang-Undang Pemerintahan Daerah tersebut membawa banyak perubahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Salah satunya adalah pembagian urusan pemerintahan daerah.

Urusan Pemerintahan dikatakan dalam pasal 9 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah yaitu:

1. Urusan pemerintahan Absolut, pada ayat 1 yang merupakan Pemerintahan yang kekuasaannya sepenuhnya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.
2. Urusan Pemerintahan Konkuren, pada ayat 1 yang merupakan urusan pemerintahan yang terbagi atas pemerintah pusat, serta daerah Provinsi dan juga Daerah Kabupaten/Kota. Dimana Urusan Pemerintahan Konkuren itu diserahkan ke daerah yang menjadi dasar dalam pelaksanaan Otonomi Daerah.

Asas dalam Otonomi Daerah yaitu yang pertama adalah prinsip dasar penyelenggaraan dalam Pemerintahan Daerah berdasarkan Asas Otonomi terkait. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal diwilayah tertentu, dana atau kepada gubernur dan bupati/walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintah umum.

Kewenangan Daerah Otonom Terdiri atas:

1. Urusan Pemerintahan wajib, yaitu urusan pemerintahan yang wajib diselenggarakan oleh setiap daerah, meliputi:
 - a. Berkaitan dengan Pelayanan Dasar:
 - Pendidikan;
 - Kesehatan;
 - Pekerjaan Umum dan Penataan ruang;
 - Perumahan rakyat dan kawasan pemukiman;
 - Ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat; dan
 - Sosial
 - b. Tidak berkaitan dengan Pelayanan Dasar :
 - Tenaga Kerja
 - Pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak
 - Pangan
 - Pertanahan
 - Lingkungan hidup
 - Administrasi kependudukan dan pencatatan sipil
 - Pemberdayaan masyarakat dan desa
 - Pengendalian penduduk dan keluarga berencana
 - Perhubungan
 - Komunikasi dan informatika
 - Koperasi, usaha kecil dan menengah
 - Penanaman modal
 - Kepemudaan dan olahraga
 - Statistik
 - Persandian
 - Kebudayaan
 - Perpustakaan
 - Kearsipan.
2. Urusan Pemerintahan Pilihan, yaitu urusan pemerintahan yang diselenggarakan sesuai dengan potensi yang dimiliki daerah tersebut.
3. Urusan Pemerintahan Umum, dalam ayat 1 yang merupakan menjadi urusan Pemerintahan dalam kewenangan Presiden sebagai Kepala Pemerintahan.

Daerah otonom yang merupakan satu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batasan-batasan wilayah. Daerah persiapan yaitu bagian dari 1 atau lebih daerah yang bersanding untuk dipersiapkan dan dibentuklah menjadi daerah baru.

Pertumbuhan dan perkembangan suatu wilayah khususnya di daerah perkotaan dilatarbelakangi dengan beberapa aspek kehidupan seperti perkembangan penduduk, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, dinamika kegiatan ekonomi, perkembangan/ penyebaran jaringan komunikasi-transportasi dan sebagainya. Faktor-faktor tersebut tentunya akan membawa perubahan terhadap bentuk keruangan yang ada di wilayah tersebut, baik secara fisiknya maupun non fisik, sebagai wadah kegiatan penduduk didalamnya. Perubahan tersebut apabila tidak ditata dengan baik dan benar maka akan mengakibatkan perkembangan yang tidak terarah dan adanya penurunan kualitas dari pemanfaatan ruang.

Kota Pekanbaru berkembang melalui fungsi dari Sungai Siak sebagai salah satu sarana transportasi terkait mendistribusikan hasil bumi dari pedalaman dan dataran tinggi, contohnya daerah Minangkabau ke wilayah Pesisir Selat Malaka. Pada tanggal 23 Juni 1784 berdasarkan musyawarah “Dewan Menteri” dari Kesultanan Siak, yang terdiri atas Datuk empat suku Minangkabau yakni (Pesisir, Limapuluh, Tanah Datar, dan juga Kampar yang menjadi bagian terakhir dari Datuk empat Suku), kawasan ini lalu dinamai dengan Pekanbaru, dan kemudian hari tersebut diperingati sebagai hari jadinya Kota Pekanbaru.

Secara geografis Kota Pekanbaru memiliki posisi strategis berada pada jalur Lintas Timur Sumatera, terhubung dengan beberapa Kota seperti Medan, Padang dan

Jambi, dengan wilayah administratif, diapit oleh Kabupaten Siak pada bagian Utara dan Timur, sementara bagian Barat dan Selatan oleh Kabupaten Kampar.

Pada tahun 2010 Pekanbaru memiliki penduduk terbanyak ketiga dipulau Sumatera setelah Medan dan Palembang, Etnis Minangkabau merupakan masyarakat terbesar dengan jumlah sekitar 37,96% dari total penduduk kota, dan Bahasa Minang menjadi sebagai salah satu Bahasa Pergaulan yang digunakan oleh penduduk Kota Pekanbaru selain Bahasa Melayu dan Bahasa Indonesia.

Pembangunan yang merupakan sebagai suatu konsep dari perubahan sosial yang terus menerus menuju kearah perkembangan dan tersebar menjadi kemajuan tentunya memerlukan masukan-masukan yang menyeluruh dan berkesinambungan. Musyawarah Perencanaan Pembangunan yang selanjutnya disingkat Musrenbang. Musrenbang Desa adalah forum rembug warga desa yang dilakukan untuk membicarakan masalah dan potensi desa agar teridentifikasi dengan baik untuk memberikan arah yang jelas atas tindakan yang layak menurut skala prioritas dan dilaksanakan dalam mengatasi masalah atau memaksimalkan potensi yang dimiliki sebagai dasar program kerja pemerintah desa melaksanakan penganggaran dan kegiatan tahunan desa. Dilaksanakannya model perencanaan partisipatif di tingkat desa yang melibatkan semua komponen masyarakat, lembaga kemasyarakatan, swasta dan pemerintah desa/lembaga pemerintah lainnya yang ada di desa, sedangkan tujuan yang hendak dicapai dengan dilaksanakannya musrenbang desa adalah:

1. Menyepakati prioritas kebutuhan dan masalah yang sangat mendesak untuk direalisasikan dalam bentuk program maupun kegiatan pada tahun perencanaan/ tahun yang akan datang.
2. Menyepakati tim delegasi desa yang akan memaparkan masalah yang menjadi kewenangan daerah yang berada di wilayah desa pada forum musrenbang kecamatan

Dalam menentukan kesepakatan prioritas kebutuhan sebagaimana no (1) di atas dihasilkan tiga kesepakatan yang akan menjadi prioritas yaitu :

1. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari dana swadaya masyarakat dan atau dari pendapatan asli desa (PAD). Kegiatan yang mendesak untuk dilaksanakan dan sangat dibutuhkan oleh masyarakat banyak, namun kegiatan ini tidak dapat dibiayai dari dana ADD maupun Dana Desa, harus dimasukkan sebagai prioritas kegiatan desa yang akan dilaksanakan sendiri oleh desa melalui swadaya masyarakat. Contoh kegiatan pembangunan mesjid/mushalla, penataan tempat pemakaman, pembangunan gapura desa dan lain-lain.
2. Menyepakati prioritas kegiatan yang akan dilaksanakan oleh desa yang akan dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) , Dana Desa (DD).
3. Menyepakati prioritas masalah daerah yang ada di desa yang menjadi kewenangan pemerintah daerah maupun pusat dan akan pada musrenbang kecamatan untuk diusulkan menjadi kegiatan yang dibiayai APBD pemerintah daerah kabupaten/kota maupun provinsi. Contoh pembangunan jalan desa yang berstatus jalan kabupaten atau provinsi, pembangunan saluran irigasi tersier maupun sekunder yang menjadi kewenangan pemerintah daerah.

Bagi Aparatur Pemerintah dari level desa sampai pemerintah pusat, awal tahun berarti siap melaksanakan perencanaan yang dibuat pada tahun sebelumnya dan harus memulai membuat perencanaan tahun mendatang.

Perencanaan ditingkat desa sampai tingkat pusat, intinya sama hanya berdeda ruang lingkup wilayah, waktu dan sebutan saja. Perencanaan tersebut terdiri dari :

1. Perencanaan Jangka Menengah (RPJM Desa , RPJMD/Kab-Kota, RPJMD/Provinsi dan RPJMN/Pemerintah Pusat. Perencanaan Jangka Menengah didesa berlaku untuk 6 (enam tahun), sedangkan bagi daerah dan Pemerintah Pusat berlaku untuk 5 (lima) tahun. Sesuai masa jabatan eksekutif ditiap tingkatan. Ditetapkan satu kali setiap periode pemilihan eksekutif, dan

sudah harus ditetapkan paling lambat tiga bulan setelah pejabat tersebut dilantik.

2. Perencanaan tahunan sebagai penjabaran perencanaan jangka menengah untuk periode tahunan juga wajib dibuat dari pemerintahan level desa sampai pusat. Rencana kerja tahunan ini akrab disebut RKP (Rencana Kerja Pemerintah). RKP disusun dan ditetapkan setiap tahun, pada tahun berjalan untuk pelaksanaan tahun yang akan datang. Contoh RKP Desa untuk tahun pelaksanaan tahun Anggaran 2018 harus sudah disahkan dengan Peraturan Desa paling lambat 31 September tahun 2017.
3. Penjabaran Rencana Kerja Pemerintah dalam Anggaran dituangkan dalam bentuk Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBDesa s.d RAPBN). Dan harus sudah disahkan paling lambat akhir tahun menjelang awal tahun pelaksanaan.

Pada awal tahun pemerintah pada level desa sampai pusat harus mengerjakan dua hal. Ibarat mata uang yang memiliki dua sisi. Tdak ada mata uang didunia ini yang hanya memiliki gambar satu sisi. Kalau ada pasti mata uang tersebut tidak akan laku alias palsu. Demikian halnya dalam pemerintahan satu tahun berarti dua sisi pekerjaan. Sisi pertama yaitu mengerjakan perencanaan yang dibuat tahun sebelumnya. Dan sisi kedua membuat perencanaan untuk tahun yang akan datang. Kedua sisi pekerjaan tersebut dilaksanakan bersamaan pada tahun yang sama.

Pemberdayaan masyarakat yang merupakan salah satu dari upaya untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat, melaluin kegiatan-kegiatan, yakni peningkatan prakarsa dan swadaya masyarakat, serta perbaikan lingkungan dan perumahan, termasuk pengembangan usaha ekonomi, dan terakhir pengembangan Lembaga Keuangan serta kegiatan-kegiatan yang tentunya dapat meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menaikkan hasil produksinya. Memberdayakan masyarakat adalah upaya tentunya untuk meningkatkan harkat dan juga martabat lapisan masyarakat bawah atau kurang mampu yang dalam kondisi sekarang tidak

mampu untuk melepaskan diri dari perangkap kemiskinan dan keterbelakangan. Menurut Tri Winarni, inti pemberdayaan meliputi tiga hal, yaitu pengembangan (*enabling*), memperkuat potensi atau daya (*empowering*), dan memperkuat kemandirian (Kasim dan Karim, 2006).

Tujuan pemberdayaan salah satunya menurut Sulistiyani (2004) adalah terbentuknya individu baru dan masyarakat mandiri. Kemandirian tersebut tentunya meliputi kemandirian secara berpikir, bertindak dan juga mengendalikan apa yang mereka lakukan. Kemandirian masyarakat yang merupakan suatu kondisi yang dialami oleh masyarakat dengan ditandai atas kemampuan memikirkan, juga memutuskan, serta melakukan sesuatu yang dipandang tepat dan cepat demi mencapai pemecahan masalah-masalah yang sedang dihadapi dengan salah satunya mempergunakan daya atau kemampuan yang dimilikinya.

Proses pemberdayaan terdapat dua kecenderungan. Yang pertama, proses pemberdayaan yang menekankan pada proses memberikan atau mengalihkan sebagian dari kekuatan, serta kekuasaan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu tersebut lebih berdaya. Kecenderungan pertama itu dapat disebut sebagai kecenderungan primer dari makna pemberdayaan. Sedangkan kecenderungan yang kedua atau kecenderungan sekunder kebalikan dari primer yaitu menekankan pada proses menstimulasi, juga mendorong atau memotivasi individu tersebut agar mempunyai kemampuan atau keberdayaan yang baik untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog (Pranarka dan Vidhyandika, 1996).

Berawal terbentuknya Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD), LKMD membuat kesepakatan agar melakukan temu LKMD ditingkat nasional yang dilaksanakan di Bandung pada tanggal 18-21 Juli 2000 dan berubah nama menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang berfungsi sebagai mitra dari pemerintah harus dapat mewujudkan peran dan fungsinya sebagai lembaga sosial kemasyarakatan, melalui kerjasama-kerjasama dengan berbagai pihak yang tentunya untuk meningkatkan pembangunan dan juga pemberdayaan masyarakat didesa.

LPM tersebut dipakai sebagai nama pengganti LKMD. LPM dideklarasikan tanggal 21 Juli 2000 melalui forum Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional yang dilaksanakan di Bandung yang diikuti oleh para utusan-utusan LKMD se-Indonesia. Peserta yang hadir dengan membawa mandate yang penuh dari provinsinya masing-masing untuk mempelajari, serta menelaah dan membuat kesepakatan-kesepakatan nasional terkait keberadaan lembaga sosial kemasyarakatan yang sesuai dengan kebutuhan-kebutuhan masyarakat didesa ataupun kelurahan.

Dalam pertemuan Musyawarah Temu LKMD Tingkat Nasional tersebut akhirnya mendapatkan kesepakatan Nasional yang dikenal dengan sebutan “Deklarasi Bandung” yang dimuat dalam 2(dua) hal yang fundamental:

1. Pertama, dengan merubah nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa/Kelurahan (LKMD/K) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

2. Kedua, terbentuknya Asosiasi LPM secara nasional dengan diawalinya pembentukan DPP atau dengan sebutan Dewan Pimpinan Pusat LPM. (Sumber : H. Zainal Efendy, 2001).

Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Lembaga, Organisasi atau salah satu wadah yang di bentuk atas prakarsa masyarakat sebagai mitra bagian dari pemerintah kelurahan dalam menampung dan mewujudkan aspirasi-aspirasi dan kebutuhan masyarakat di bidang pembangunan. Tujuan utama dalam pembentukannya lembaga ini tentunya untuk meningkatkan prakarsa dan swadaya masyarakat dalam menjalankan program pembangunan yang secara partisipatif. Dalam hal ini tentunya partisipatif dari masyarakat yang dikembangkan melalui Lembaga Pemberdayaan Masyarakat ini mencakup dari aktivitas-aktivitas dalam merencanakan dan mengawasi pelaksanaan pembangunan ditingkat kelurahan.

Dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan sangat jelas disebutkan bahwa terkait dengan tugas dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas dalam membantu Lurah dalam pelaksanaan urusan pembangunan, serta social kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 pasal 3 dan pasal 4 yang berbunyi :

1. Pasal 3 ayat (1)

Lembaga Kemasyarakatan Desa sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 ayat (1) mempunyai tugas membantu Pemerintah Desa dan merupakan mitra dalam memberdayakan masyarakat desa. (2) Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

a. Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif.

Partisipatif disini dimaksudkan adalah suatu keterlibatan nyata mental dan emosi serta fisik peserta dalam memberikan respon terhadap kegiatan yang melaksanakan dalam proses belajar mengajar serta mendukung pencapaian tujuan dan bertanggung jawab atas keterlibatan (Keith Davis). Menyusun rencana pembangunan yang partisipatif dimana menyusun rencana pembangunan di Kelurahan Meranti Pandak sebagaimana dari program LPM itu sendiri diantaranya renovasi rumah dan juga rumah layak huni.

b. Menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat.

Sebagai salah satu tugas dari LPM itu sendiri dimana menggerakkan swadaya gotong royong masyarakat, LPM di Kelurahan Meranti Pandak itu sendiri membantu satu sama lain dengan menggerakkan pembangunan merenovasi rumah dan rumah layak huni setiap seminggu atau dua minggu sekali agar terselesaikan pada waktunya dan juga membuat sosialisasi dalam hal penyusunan pembangunan.

c. Melaksanakan dan mengendalikan pembangunan.

Dalam melaksanakan tugas LPM itu sendiri tentunya memiliki target dan pencapaiannya sendiri. Dalam hal ini LPM tentunya melaksanakan pembangunan berupa merenovasi rumah dan juga rumah layak huni untuk masyarakat. Tentunya

tidak hanya dalam hal melaksanakan tugas terdapat juga mengendalikan dari program LPM itu sendiri dimana program itu dapat berjalan dengan baik dan sesuai target dari tujuan awalnya.

2. Pasal 4 ayat (1)

Fungsi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat :

- a. Sebagai Penampung dan juga penyalur aspirasi-aspirasi masyarakat dalam hal pembangunan.
- b. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka untuk memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).
- c. Untuk Peningkatan kualitas dan juga percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat.
- d. Penyusunan rencana, serta pelaksana, pengendali, pelestarian, dan juga pengembangan hasil-hasil pembangunan yang secara partisipatif.
- e. Wadah untuk Penumbuh Kembangan dan penggerak dari prakarsa dan partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat.
- f. Penggali, serta pendayaguna dan juga pengembangan potensi sumberdaya serta keserasian lingkungan hidup.

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2

ayat (1) ditujukan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui

:

- a. Peningkatan pelayanan di masyarakat.
- b. Peningkatan peran serta masyarakat tentunya dalam hal pembangunan.
- c. Terkait pengembangan kemitraan.
- d. Pemberdayaan masyarakat dan;
- e. Pengembangan kegiatan lain yang sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

Dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya, Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut Lembaga Pemberdayaan Masyarakat(LPM) dibantu oleh kader-kader pilihan pemberdayaan masyarakat. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat juga memiliki hubungan kerja sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 sebagai berikut :

- a. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan kelurahan bersifat konsultatif dan koordinatif.
- b. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan Lembaga Kemasyarakatan lainnya di Kelurahan bersifat koordinatif dan konsultatif.
- c. Hubungan kerja Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan dengan pihak ketiga di kelurahan bersifat kemitraan.
- d. Menurut Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) bertujuan tentunya sebagai mitra Pemerintah Kelurahan dalam penataan hasil dari pembangunan dengan menambahkan prakarsa-prakarsa serta menggerakkan swadaya gotong-royong masyarakat dalam hal pembangunan, sehingga tentunya masyarakat memiliki Kelurahan yang tangguh serta memiliki kemampuan dalam mengembangkan dan menciptakan ketahanan dalam menghadapi dan mengatasi segala tantangan dan hambatan yang ada dalam rangka pembonaan wilayah.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Pasal 3 ayat (1) LPMK dibentuk disetiap Kelurahan, ayat (2) LPMK kedudukannya sebagai mitra dari Pemerintah dalam bidang Pembangunan dan selanjutnya ayat (3) LPMK sebagaimana dalam ayat (1) dan ayat (2) mempunyai wilayah kerja di Kelurahan. Adapun Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan mempunyai Tugas dan Fungsi yang dimuat Pasal 4 ayat (1) dan ayat (2) sebagai berikut :

- (1) LPMK mempunyai beberapa tugas, yakni :
 - a. Menyusun rencana terkait hal pembangunan bersama masyarakat dan Pemerintah;
 - b. Menggerakkan dan mengkoordinasikan tentunya untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan;
 - c. Memantau pelaksanaan pembangunan; dan
 - d. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis dari masyarakat.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), terkait LPMK mempunyai beberapa fungsi didalamnya, yaitu:

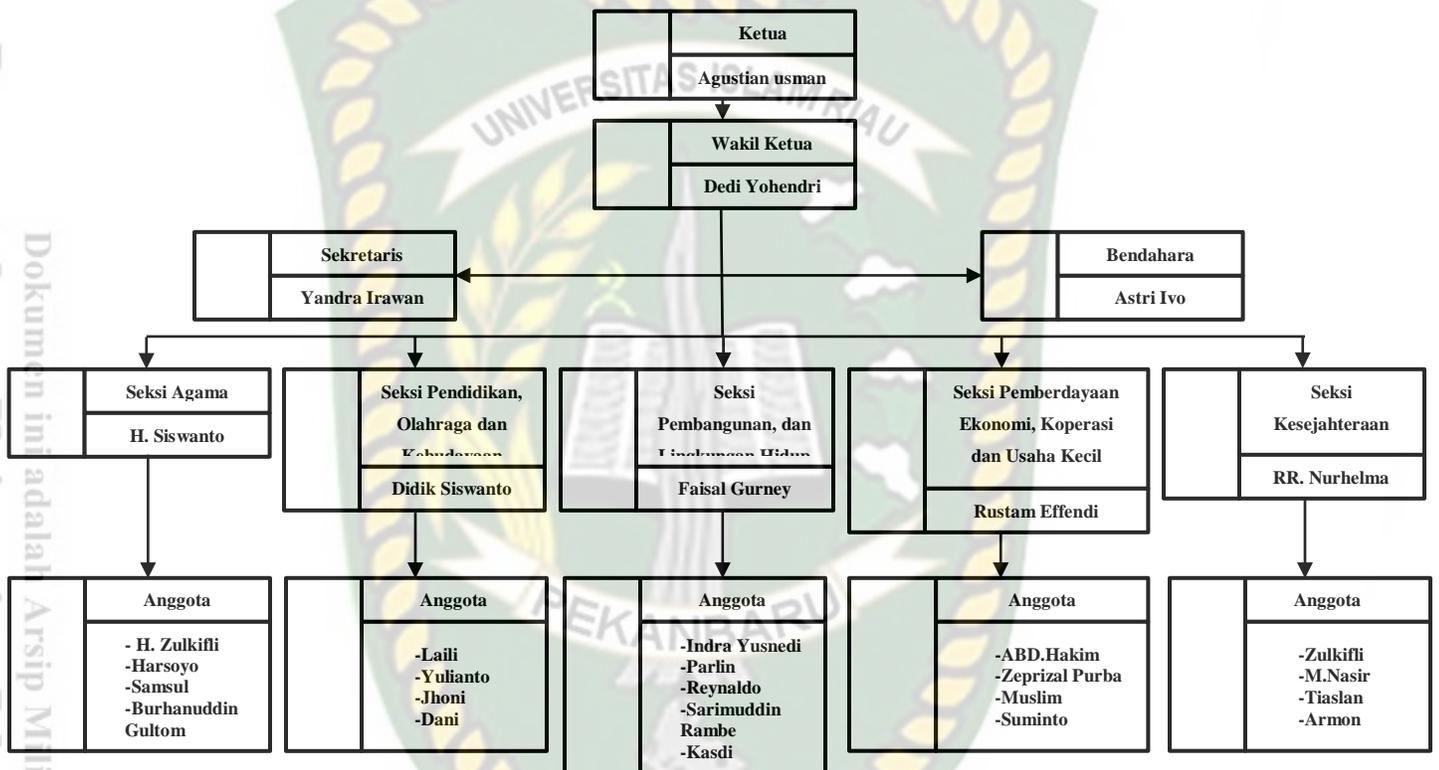
- a. Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat Kelurahan;
- b. Sebagai wadah partisipasi bagi masyarakat dalam merencanakan pelaksanaan pembangunan secara terpadu dan efektif;
- c. Sebagai media komunikasi dan informasi antara Pemerintah Kelurahan, masyarakat dan juga antar warga masyarakat;
- d. Penggalian dan pemanfaatan sumber daya kelembagaan untuk pembangunan di Kelurahan, diantaranya melalui pelaksanaan pelestarian nilai-nilai social budaya, serta penguatan kapasitas lembaga masyarakat, pelaksanaan dan juga peningkatan ekonomi masyarakat, pemanfaatan sumber daya alam.

Sifat- Sifat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat antara lain:

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) sebagai Lembaga yang independent non partisan dan tidak melakukan kegiatan politik praktis.
2. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah mitra dari Pemerintah Desa ataupun Kelurahan dalam Sub Sistem Pembangunan.
3. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah lembaga yang professional dan juga operasional yang tersurat dalam struktur organisasinya juga tersirat dalam tupoksinya.

Kedudukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri tentunya berkedudukan di Desa/ Kelurahan diseluruh Indonesia (Undang-Undang No. 32/2004 Tentang Pemerintah Daerah, pasal 127 ayat 3 dan 8 untuk kelurahan dan pasal 211 ayat 1 untuk desa. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat adalah mitra pemerintah dalam subsistem pembangunan (pasal 211 ayat 2).

Gambar 1.1 : Struktur Pengurus Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru



Sumber : LPM Kelurahan Meranti Pandak

Keberhasilan pembangunan bukan hanya tanggung jawab dari pihak penyelenggara dalam hal ini pemerintah, tetapi juga peran serta masyarakat terutama kerjasamanya maupun sikap tanggung jawab terhadap setiap kegiatan pembangunan yang dilaksanakan.

Menyadari akan pentingnya peranan Lembaga Kemasyarakatan dalam menggerakkan pembangunan di Desa diantaranya adalah Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang salah satu tugasnya adalah melaksanakan dan mengendalikan pembangunan. Akan tetapi dalam menjalankan tugasnya terutama dalam pelaksanaan dan mengendalikan pembangunan belum menunjukkan kegiatan yang berarti sebagai mitra kerja Pemerintahan seperti Rumah Layak Huni, dan Renovasi Rumah di Kelurahan Meranti Pandak.

Sebagaimana gambaran pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir dapat dilihat data tabel 1.1 :

Tabel 1.1 Program Pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak

No	Jenis Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	Renovasi Rumah untuk penduduk dibawah 60 tahun	Rp 15.000.000	Selesai
2	Renovasi Rumah untuk penduduk diatas 60 tahun	Rp 17.500.000	Selesai
3	Rumah Layak Huni (bantuan tahap 1) sebanyak 16 unit	Rp 43.000.000	Selesai
4	Rumah Layak Huni (bantuan tahap 2) sebanyak 3 unit	Rp 55.000.000	Selesai

Sumber: Ketua LPM Kelurahan Meranti Pandak

Dilihat dari data tabel diatas dapat dijelaskan bahwa di Kelurahan Meranti Pandak terdapat beberapa perencanaan pembangunan seperti renovasi rumah, dan pembangunan rumah layak huni yang sudah terselesaikan.

Berdasarkan observasi yang penulis lakukan diketahui bahwa Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak

1. Terindikasi bahwa kurangnya sosialisasi kepada masyarakat mengenai pembangunan yang sudah direncanakan sehingga masih banyak nya masyarakat yang kurang paham terkait manfaat pembangunan yang dilakukan.
2. Terindikasi masih sering terjadinya banjir tahunan yang disebabkan curah hujan deras dikarenakan tidak adanya parit yang memadai.
3. Terindikasi kurangnya pengendalian dan perawatan infrastruktur sehingga terjadinya kerusakan jalan dan hilangnya lampu-lampu jalan yang disebabkan oleh oknum yang tidak bertanggung jawab.

Berdasarkan fenomena yang penulis temui, maka penulis melakukan penelitian dengan judul : “ **Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak**”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang telah penulis paparkan dalam latar belakang masalah diatas, maka perumusan masalah penelitian ini adalah : “**Bagaimana Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru?**”.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Adapun tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisa hasil pelaksanaan tugas-tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Meranti Pandak.
 - b. Untuk mengetahui sejauh mana hambatan-hambatan ataupun kendala yang membuat pelaksanaan tugas tersebut di Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) di Kelurahan Meranti Pandak.
2. Kegunaan Penelitian
- a. Kegunaan Teoritis
 1. Sebagai kajian studi banding antara pengetahuan yang sifatnya teoritis dengan kenyataan yang ada dilapangan.
 2. Mengembangkan dan memperkaya wawasan penulis tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan.
 - b. Kegunaan Praktis
 1. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak yang bersangkutan terkait dengan pelaksanaan tugas lembaga pemberdayaan masyarakat.
 2. Bagi aktifitas akademika, penelitian ini diharapkan bermanfaat sebagai referensi dan sebagai bahan pembanding bagi peneliti yang akan melakukan penelitian dimasa akan datang.

BAB II

STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIR

A. Studi Kepustakaan

Sebagai kerangka acuan berpikir dalam memecahkan pokok permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini penulis akan memaparkan konsep-konsep atau teori-teori yang ada relevansinya untuk mendukung pemecahan masalah yang dikemukakan diatas.

1. Konsep Ilmu Pemerintahan

Berdasarkan uraian yang dijelaskan Syafiie (2005;23), Ilmu pemerintahan itu ialah Ilmu yang mempelajari bagaimana dalam melaksanakan pengurusan yang (eksklusif), serta pengatur (legislatif), kepemimpinan dan koordinasi pemerintah (baik itu pusat dengan daerah, maupun rakyat dengan pemerintahannya) dalam berbagai peristiwa-peristiwa dan gejala-gejala pemerintahan, secara baik dan benar.

Sedangkan Gaffar (dalam Ndraha,2010;16) mendefinisikan “ilmu pemerintahan sebagai ilmu yang mempelajari proses politik (alokasi otoritatif nilai-nilai dalam sebuah masyarakat) dalam penyelenggaraan pemerintahan sebuah negara”.

Selanjutnya Musanef (Dalam Syafiie, 2011;8) berpendapat “bahwa ilmu pemerintahan adalah suatu ilmu yang dapat, menguasai dan memimpin serta menyelidiki unsur-unsur dinas, berhubungan dengan keserasian ke dalam dan

hubungan antara dinas-dinas itu dengan masyarakat yang kepentingan diwakili oleh dinas itu”.

Sedangkan Brasz (dalam Syafii, 2009;21) bahwa “ilmu pemerintahan dapat diartikan sebagai ilmu yang mempelajari tentang cara bagaimana lembaga pemerintahan umum itu disusun dan difungsikan baik secara ke dalam maupun keluar terhadap warganya”. Sehingga melihat dari definisi diatas bahwa Ilmu Pemerintahan yang merupakan ilmu yang mempelajari tentang bagaimana Lembaga Pemerintahan tersebut dalam melakukan kegiatan internalnya maupun eksternalnya serta mengenai fungsinya sebagai pelaksana ketentuan yang berlaku pada negara.

Dalam melaksanakan suatu pemerintahan yang baik terdapat beberapa uraian-uraian definisi tentang pengertian pemerintahan, secara etimologi pemerintahan dapat diartikan sebagai berikut :

1. Pemerintah berarti melakukan pekerjaan menyuruh. Yang berarti didalamnya terdapat dua pihak, yaitu yang memerintah memiliki wewenang dan diperintah memiliki kepatuhan akan keharusan ;
2. Setelah ditambah awalan “pe” menjadi pemerintah, yang berarti badan yang melakukan kekuasaan memerintah ;
3. Setelah ditambah lagi akhiran “an” menjadi pemerintahan. Berarti perbuatan, cara hal atau urusan dari badan yang memerintah tersebut.

Menurut Ndraha (2010;6) “pemerintahan gejala social, artinya terjadi didalam hubungan antar anggota masyarakat, baik individu dengan individu, kelompok dengan kelompok, maupun antar individu dengan kelompok”.

Menurut Apater, “pemerintahan itu merupakan satuan anggota yang paling umum yang (a) memiliki tanggung jawab tertentu untuk mempertahankan sistem yang mencakupnya, itu adalah bagian (b) monopoli praktis mengenai kekuasaan paksaan” (Dalam Syafiie,2005:21).

“Pemerintah merupakan suatu bentuk organisasi yang bekerja dan menjalankan tugas untuk mengelola sistem pemerintah dan menetapkan kebijakan dalam mencapai tujuan negara”. “Hal tersebut seperti yang telah kami sampaikan melalui tulisan mengenai Arti Pemerintah”. “Dalam menyelenggarakan tugasnya, pemerintah memiliki beberapa fungsi seperti yang dijelaskan beberapa tokoh dibawah ini”.

Menurut Adam Smith (1976), “pemerintah suatu negara mempunyai tiga fungsi pokok” sebagai berikut:

- Memelihara keamanan dan pertahanan dalam negeri.
- Menyelenggarakan peradilan.
- Menyediakan barang-barang yang tidak disediakan oleh pihak swasta.

Sedangkan menurut Richard A. Musgrave “dibedakan menjadi tiga fungsi dan tujuan kebijakan anggaran belanja pemerintah”, yaitu:

1. Fungsi Alokasi (*Allocation Branch*) yaitu “fungsi pemerintah untuk menyediakan pemenuhan untuk kebutuhan Publik (*public needs*)”
2. Fungsi Distribusi (*Distribution Branch*) yaitu “fungsi yang dilandasi dengan mempertimbangkan pengaruh sosial ekonomis; yaitu pertimbangan tentang kekayaan dan distribusi pendapatan, kesempatan”.

Berdasarkan dua pendapat yang dipaparkan, terkait pemerintah diantaranya memiliki beberapa fungsi :

1. Pelayanan

Terkait perbedaan pelaksanaan dalam hal fungsi pelayanan yang dilakukan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terletak pada kewenangannya masing-masing. “Kewenangan pemerintah pusat mencakup urusan Pertahanan Keamanan, Agama, Hubungan luar negeri, Moneter dan Peradilan. Secara umum pelayanan pemerintah mencakup pelayanan publik (*Public service*) dan pelayanan sipil (*Civil service*) yang menghargai kesetaraan”.

2. Pengaturan

Fungsi ini dilaksanakan pemerintah dengan membuat peraturan perundang-undangan untuk mengatur hubungan manusia dalam masyarakat. “Pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan peraturan agar kehidupan dapat berjalan secara baik dan dinamis”. Sama halnya dengan “fungsi pemerintah pusat, pemerintah daerah juga mempunyai fungsi pengaturan terhadap masyarakat yang ada di daerahnya”. Dalam

hal perbedaannya, yang diatur oleh “Pemerintah Daerah lebih khusus, yaitu urusan yang telah diserahkan kepada Daerah. Untuk mengatur urusan tersebut diperlukan Peraturan Daerah yang dibuat bersama antara DPRD dengan eksekutif”.

3. Pembangunan

Pemerintah tentunya harus berfungsi sebagai salah satu pemacu pembangunan yang ada di wilayahnya, dimana pembangunan ini mencakup dari segala aspek kehidupan yang tidak hanya fisik tetapi juga melalui mental spriritual. Pembangunan akan berkurang apabila keadaan dari masyarakat membaik, yang artinya masyarakat tersebut menjadi sejahtera. Jadi, “fungsi pembangunan akan lebih dilakukan oleh pemerintah atau Negara berkembang dan terbelakang, sedangkan Negara maju akan melaksanakan fungsi ini seperlunya”.

4. Pemberdayaan (*Empowerment*)

Pemberdayaan ini untuk mendukung terselenggaranya otonomi daerah, fungsi ini dimana menuntut pemberdayaan dari Pemerintah Daerah dengan kewenangan yang cukup dalam pengelolaan sumber daya daerah guna untuk melaksanakan berbagai urusan yang didesentralisasikannya. Dimana “Pemerintah Daerah perlu meningkatkan peranserta masyarakat dan swasta dalam kegiatan pembangunan dan penyelenggaraan pemerintahan”. Kebijakan pemerintah, baik pusat dan daerah, diarahkan untuk meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat itu sendiri, yang pada jangka panjangnya dapat menunjang dari segi pendanaan Pemerintah Daerah. “Dalam fungsi ini pemerintah harus memberikan ruang yang cukup bagi aktifitas mandiri masyarakat, sehingga dengan demikian partisipasi masyarakat di Daerah

dapat ditingkatkan”. Alangkah baiknya apabila kepentingan masyarakat diperhatikan, baik dalam peraturan itu sendiri maupun dalam tindakan nyata dari pemerintah.

2. Konsep Pemberdayaan

“Pemberdayaan masyarakat adalah upaya untuk meningkatkan kemampuan dan potensi yang dimiliki masyarakat, sehingga masyarakat dapat mewujudkan jati diri, harkat dan martabatnya secara maksimal untuk bertahan dan mengembangkan diri secara mandiri baik dibidang ekonomi, sosial, agama, dan budaya menurut Widjaja”, (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015:123).

Menurut Slamet (dalam Anwas 2013:48) “menekankan bahwa hakikat pemberdayaan adalah bagaimana membuat masyarakat mampu membangun dirinya dan memperbaiki kehidupannya sendiri, istilah mampu disini mengandung makna: berdaya, paham, termotivasi, mampu bekerjasama, tahu sebagai alternative, mampu mengambil keputusan, berani mengambil resiko, mampu mencari dan menangkap informasi , serta mampu bertindak sesuai inisiatif”.

Menurut Suhendra (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015:142) “pemberdayaan adalah suatu kebijakan yang berkesinambungan, dinamis dan secara sinergis dan mendorong keterlibatan semua potensi, dengan cara ini akan memungkinkan terbentuknya masyarakat dinamis”.

Sulistiyani (2004) berpendapat bahwa secara “etimologis pemberdayaan berasal dari kata dasar “daya” yang berarti kekuatan atau kemampuan”. Bertolak dari pengertian tersebut, maka pemberdayaan diartikan sebagai proses untuk memperoleh

daya, serta kekuatan ataupun kemampuan, dan atau proses pemberian daya, kekuatan atau kemampuan dari pihak yang memiliki daya kepada pihak yang kurang mendapatkan daya atau belum berdaya.

Shardlow berpendapat dalam Adi (2008)“pengertian pemberdayaan, pada intinya membahas bagaimana individu, kelompok ataupun komunitas berusaha mengontrol kehidupan mereka sendiri dan mengusahakan untuk membentuk masa depan sesuai dengan keinginan mereka”. Dapat disimpulkan bahwa, Shardlow menggambarkan bahwa pemberdayaan tersebut sebagai sesuatu bentuk gagasan yang tidaklah jauh berbeda dengan gagasan Biestek dalam Notoatmodjo (2005) yang dikenal dalam bidang Pendidikan ilmu kesejahteraan social dengan sebutan “self determination”.

Menurut Suharto (dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf 2015:142) “menjelaskan bahwa pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan dapat dicapai melalui penerapan pendekatan pemberdayaan” berikut :

- 1) Pemungkinan : dalam menciptakan suasana atau iklim dalam memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan structural yang menghambat.
- 2) Penguatan : untuk memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki oleh masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhan-kebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuh-kembangkan segenap

kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian mereka.

- 3) Perlindungan : untuk melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok yang lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, agar menghindari terjadinya persaingan yang tak seimbang (apalagi tidak sesuai) antara yang kuat dengan yang lemah, dan juga mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok yang lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghasusan segala jenis diskriminasi dan juga dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan : penyokongan yang dimaksud untuk memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu dalam menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya masing-masing. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh kedalam keadaan dan juga posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.
- 5) Pemeliharaan : memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi antara berbagai kelompok didalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan serta keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan untuk berusaha.

Menurut Suharto (dalam Anwas 2013:50) pemberdayaan paling tidak memiliki empat hal, yaitu : merupakan kegiatan yang terencana dan kolektif, memperbaiki kehidupan masyarakat, prioritas bagi kelompok lemah atau kurang beruntung, serta dilakukan melalui program peningkatan kapasitas.

3. Konsep Pengendalian

Menurut Sjafrizal (2014:100) “Pengendalian atau pemantauan dilakukan pada waktu program dan kegiatan sedang dilaksanakan. Kegiatan pengendalian ini disiapkan apa yang direncanakan sebelumnya”. Unsur-unsur pengendalian yang dilakukan adalah dari segi kesesuaian fisik dan kualitas kerja, realisasi pembangunan dana maupun waktu yang digunakan untuk pelaksanaan program dan kegiatan. Sedangkan evaluasi dilakukan setelah program dan kegiatan selesai dilaksanakan. Beberapa tahun kemudian dilakukan evaluasi untuk mengetahui apakah pelaksanaan pembangunan sesuai dengan tujuan dan sasaran dari perencanaan. Kegiatan pengendalian dan evaluasi tersebut dilakukan bukanlah untuk menemukan penyelewengan keuangan sebagaimana yang bisa dilakukan dalam pengawasan dan pemeriksaan.

“Pengendalian merupakan salah satu bagian dari manajemen. Pengendalian dilakukan dengan tujuan supaya apa yg sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mencapai target maupun tujuan yg ingin dicapai. Pengendalian memang merupakan salah satu tugas dari manager”. Satu hal yg harus dipahami, dimana pengendalian dan pengawasan yang merupakan berbeda karena dalam pengawasan merupakan bagian dari pengendalian tersebut. Bila pengendalian dilakukan dengan disertai pelurusan (tindakan korektif), maka tentunya pengawasan merupakan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali ataupun secara berkala.

Mulyadi (2007:89) berpendapat bahwa “Pengendalian merupakan usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui perilaku yg diharapkan. Sedangkan menurut Indra Bastian (2006:70) pengendalian merupakan tahap penentu keberhasilan manajemen”.

Pendapat Dessler dan Dharma (2009.:62) “mengemukakan bahwa pengendalian merupakan kebijakan dan prosedur yg dikembangkan oleh organisasi untuk menghadapi resiko”.

Hasibuan (2008:39) mendefinisikan “pengendalian merupakan suatu proses penjaminan di mana perusahaan dan orang - orang yg berada dalam perusahaan tersebut bisa mencapai tujuan yg sudah ditetapkan”.

Selanjutnya Harahap (2011:89) dimana “Pengendalian merupakan suatu tindakan pengawasan yg disertai tindakan pelurusan (korektif)”. “Sedangkan menurut Mathis dan Jackson. (2008:89) Pengendalian merupakan emantau kemajuan dari organisasi atau unit kerja thd tujuan - tujuan dan kemudian mengambil tindakan - tindakan perbaikan jika diperlukan”.

Berdasarkan uraian beberapa pendapat di atas dapat di tarik kesimpulan bahwa pengendalian merupakan pemantauan, serta pemeriksaan dan evaluasi yang dilakukan oleh atasan atau pimpinan dalam organisasi terhadap komponen organisasi dan juga sumber-sumber yang ada untuk mencapai tujuan yg sudah ditetapkan sebelumnya, secara terus menerus dan berkesinambungan agar semua bisa berfungsi secara baik dan maksimal sehingga tujuan organisasi bisa tercapai secara efektif dan efisien.

A. Asas-Asas Pengendalian

Pengendalian ini dilakukan dengan tujuan agar apa yang sudah direncanakan bisa dilaksanakan dengan baik sehingga bisa mendapatkan target dan tujuan yang ingin dicapai nantinya. Pengendalian memang merupakan sebagai salah satu dari tugas manager. Satu hal yang dapat dipahami, bahwa “pengendalian dan pengawasan merupakan berbeda karena pengawasan merupakan bagian dari pengendalian”. Apabila pengendalian dilakukan dengan disertai oleh pelurusan (tindakan korektif), maka pengawasan yang merupakan pemeriksaan di lapangan yang dilakukan pada periode tertentu secara berulang kali ataupun secara berkala.

Adapun Harold Koontz dan Cyril O’Donnel (2007:89) menetapkan beberapa asas pengawasan yakni :

1. Asas Tercapainya Tujuan (*Principle of assurance of objective*), pengawasan harus ditujukan kearah tercapainya tujuan itu sendiri, yaitu dengan cara mengadakan perbaikan (koreksi) untuk menghindari terjadinya penyimpangan-penyimpangan/deviasi dari perencanaan nantinya.
2. Asas Efisiensi Pengawasan (*principle of efficiency of control*). Pengawasan itu dapat efisien apabila dapat menghindari deviasi-deviasi dari perencanaan, sehingga tidak menimbulkan hal-hal lain yang ada diluar dugaan.
3. Asas Tanggung Jawab Pengawasan (*principle of control responsibility*). Pengawasan hanya bisa dilaksanakan apabila manager bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan rencana.

4. Asas Pengawasan terhadap Masa Depan (*principle of future control*). Pengawasan yang efektif harus ditujukan kearah pencegahan penyimpangan perencanaan yang akan terjadi baik pada waktu sekarang maupun masa yg akan datang nantinya.
5. Asas Pengawasan Langsung (*principle of direct control*). Teknik kontrol yang paling efektif ialah dengan mengusahakan adanya manager bawahan yg berkualitas baik. Pengawasan itu dilakukan oleh manager atas dasar bahwa manusia itu sering berbuat salah .Cara yg paling tepat untuk menjamin adanya pelaksanaan yg sesuai dengan perencanaan ialah mengusahakan sebisa mungkin para petugas memiliki kualitas yg baik.
6. Asas Refleks Perencanaan (*principle of replection of plane*). Pengawasan harus disusun dengan baik, sehingga dapat mencerminkan suatu karakter dan susunan perencanaan kedepannya.
7. Asas Penyesuaian dengan Organisasi (*principle of organizational suitability*). Pengawasan harus dilakukan sesuai dengan struktur organisasi. Manager dan bawahannya merupakan sarana untuk melaksanakan rencana. Dengan demikian pengawasan yg efektif harus disesuaikan dengan besarnya wewenang manager, sehingga mencerminkan struktur organisasi.
8. Asas Pengawasan Individual (*principle of individuality of control*). Pengawasan harus sesuai dengan kebutuhan manager. Teknik kontrol harus ditunjukkan thd kebutuhan-kebutuhan akan informasi setiap manager. Ruang lingkup informasi

yg dibutuhkan itu berbeda satu sama lain, tergantung pada tingkat dan tugas manager.

9. Asas Standar (*principle of standard*). Kontrol yang efektif dan efisien tentunya memerlukan standar yang tepat, nantinya akan dipergunakan sebagai tolak ukur pelaksanaan dan tujuan yg tercapai.
10. Efektif dan Efisien Asas Pengawasan terhadap Strategis (*principle of strategic point control*). Pengawasan yang memerlukan adanya perhatian yang nantinya ditujukan terhadap faktor-faktor yang strategis dalam perusahaan.
11. Asas Pengecualian (*the exception principle*). Efisien dalam kontrol membutuhkan adanya perhatian yang ditujukan terhadap faktor kekecualian. Kekecualian ini bisa terjadi dalam keadaan tertentu ketika situasi berubah/atau tidak sama.
12. Asas Pengawasan Fleksibel (*principle of flexibility of control*). Pengawasan harus luwes untuk menghindari kegagalan pelaksanaan pada perencanaan.
13. Asas Peninjauan Kembali (*principle of review*). Sistem kontrol harus ditinjau berkali-kali dan terus menerus agar sistem yang digunakan berguna untuk mencapai tujuan.
14. Asas Tindakan (*principle of action*). Pengawasan bisa dilakukan apabila ada ukuran-ukuran untuk mengoreksi penyimpangan-penyimpangan rencana, serta organisasi, staffing dan directing.

4. Konsep Pembangunan

Konsep pembangunan telah berkembang sejalan dengan perubahan zaman. Sesuai dengan tujuan pembangunan itu memunculkan sebagai konsep tentang pembangunan. Ndraha dalam Hanim,(2003:64), mengemukakan konsep pembangunan sebagai pertumbuhan (*growth*), rekontruksi (*reconstruction*), modernisasi (*modernization*), perubahan sosial (*social change*), pembebasan (*liberation*), pembaharuan (*innovation*), pembangunan bangsa (*nation building*), pembangunan nasional (*national development*), pengembangan dan pembinaan.

Sedangkan Rogers (dalam Nasution, 2004:82) mengartikan pembangunan sebagai proses yang terjadi pada level atau tingkatan sistem sosial, sedangkan modernisasi menunjuk pada proses yang terjadi pada level individu. Kalaupun pengertian istilah itu dibedakan, maka pembangunan dimaksudkan yang terjadi pada bidang ekonomi, atau lebih mencakup seluruh proses yang analog dan seiring dengan itu, dalam masyarakat secara keseluruhan.

Pembangunan merupakan suatu proses perubahan disegala bidang kehidupan yang dilakukan secara sengaja berdasarkan suatu rencana tertentu,(dalam Soekanto, 2006).

Agar pembangunan yang dilaksanakan mampu menciptakan kemajuan dalam berbagai bidang dan segi kehidupan masyarakat, maka selain itu dibutuhkan alokasi dana yang memadai, juga sangat diperlukan suatu pendekatan strategi yang tepat dan dapat dilaksanakan, yang meliputi strategi perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pemeliharaan hasil-hasil pembangunan. Oleh karnanya, maka setiap apaatur pemerintah yang terkait dalam hal ini sudah seharusnya mampu menyusun

suatu strategi pembangunan yang efektif dalam mencapai keberhasilan pembangunan, mulai dari tingkat pusat hingga pada tingkatan yang terendah yakni pada pembangunan yang dilaksanakan ditingkat desa.

Salah satu yang cukup penting di dalam pembangunan Desa/Kelurahan adalah sebagaimana pihak pemerintah membangkitkan kekuatan motivasi yang dalam struktur sosial masyarakat, dan perubahan budaya, serta pola pikir masyarakat. Pemerintah daerah harus mampu menumbuh- kembangkan inisiatif dan partisipasi masyarakat didalam setiap agenda pembangunan. Untuk itu keberadaan lembaga kemasyarakatan sangat dibutuhkan sebagai mitra pemerintah dalam pelaksanaan pembangunan daerah sehingga tujuan dan sasaran pembangunan tersebut dapat dicapai secara maksimal.

Teori pembangunan dalam ilmu sosial dapat dibagi ke dalam dua paradigma besar, modernisasi dan ketergantungan dalam (Tikson, 2005). Paradigma modernisasi mencakup teori-teori makro tentang pertumbuhan ekonomi dan perubahan sosial serta teori-teori mikro tentang nilai-nilai individu yang menunjang proses perubahan. Paradigma ketergantungan itu sendiri mencakup beberapa teori-teori keterbelakangan (*under-development*) ketergantungan (*dependent development*) dan sistem dunia (*world system theory*) sesuai dengan klasifikasi Larrain. Sedangkan Tikson (2005) dalam pembagian tiga klasifikasi teori pembangunan, yaitu modernisasi, serta keterbelakangan dan juga ketergantungan. Dari berbagai paradigma tersebut kemudian muncul berbagai versi tentang pengertian dari pembangunan.

Pengertian pembangunan mungkin menjadi hal yang paling menarik untuk diperdebatkan. Mungkin saja tidak ada satu disiplin ilmu yang paling tepat dalam mengartikan kata pembangunan. Dalam sejauh ini serangkaian pemikiran tentang pembangunan telah berkembang, mulai dari perspektif sosiologi klasik (Durkheim, Weber, dan Marx), pandangan dari Marxis, modernisasi oleh Rostow, strukturalisme bersama modernisasi memperkaya ulasan terhadap pendahuluan pembangunan sosial, hingga pembangunan berkelanjutan. Namun, dengan adanya tema-tema pokok yang menjadi pesan di dalamnya. (Nugroho dan Rochmin Dahuri, 2004), dalam hal ini, pembangunan dapat diartikan sebagai suatu upaya terkoordinasi untuk menciptakan alternatif yang lebih banyak secara sah kepada setiap warga negara untuk memenuhi dan mencapai aspirasinya yang paling manusiawi. Tema pertama adalah koordinasi, yang berimplikasi pada perlunya suatu kegiatan perencanaan seperti yang telah dibahas sebelumnya. Tema yang kedua adalah terciptanya alternatif yang lebih banyak secara sah. Hal ini dapat dimaknai bahwa pembangunan hendaknya berorientasi kepada keberagaman dalam seluruh aspek-aspek kehidupan. Terdapat mekanismenya menuntut kepada terciptanya kelembagaan dan hukum yang terpercaya yang dapat dan mampu berperan secara efisien, serta transparan, dan adil. Tema ketiga yaitu mencapai aspirasi yang paling manusiawi, dimana yang berarti pembangunan harus berorientasi kepada pemecahan masalah dan juga pembinaan nilai-nilai moral dan etika umat.

Mengenai pengertian pembangunan, para ahli memberikan definisi yang bermacam dan beragam seperti halnya dengan perencanaan. Istilah pembangunan

bisa saja diartikan dan diambil berbeda oleh satu orang maupun dengan orang lain, daerah yang satu dengan daerah lainnya, Negara satu dengan Negara lain juga. Namun secara umum ada suatu kesepakatan dimana bahwa pembangunan merupakan proses untuk melakukan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Siagian memberikan pendapat terkait pembangunan sebagai “Suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang berencana dan dilakukan secara sadar oleh suatu bangsa, negara dan pemerintah, menuju modernitas dalam rangka pembinaan bangsa (*nation building*)”. Sedangkan Ginanjar Kartasasmita (2003) memberikan pengertian yang lebih sederhana, yaitu sebagai “suatu proses perubahan ke arah yang lebih baik melalui upaya yang dilakukan secara terencana”.

Pada awal pemikiran terkait pembangunan sering ditemukan adanya pemikiran yang mengidentikan pembangunan dengan perkembangan, serta pembangunan dengan modernisasi dan industrialisasi, bahkan pembangunan dengan westernisasi. Seluruh pemikiran tersebut berdasarkan pada aspek perubahan, di mana pembangunan, serta perkembangan, dan juga modernisasi serta industrialisasi, secara keseluruhan tentunya mengandung unsur perubahan. Namun begitu, keempat hal tersebut tentunya mempunyai perbedaan masing-masing yang cukup prinsipil, karena masing-masing mempunyai latar belakang, azas dan hakikat yang berbeda serta prinsip kontinuitas yang berbeda pula, meskipun semuanya termasuk merupakan bentuk yang merefleksikan perubahan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Deddy T. Tikson (2005) berpendapat bahwa pembangunan nasional dapat pula dimaknai sebagai transformasi ekonomi, serta sosial dan budaya secara sengaja melalui kebijakan dan strategi menuju arah yang diinginkan. Transformasi dalam hal struktur ekonomi, contohnya, dimana dapat kita lihat melalui peningkatan atau pertumbuhan produksi yang cepat di sektor industri dan jasa, sehingga kontribusinya terhadap pendapatan nasional tentunya juga semakin besar. Maupun sebaliknya, kontribusi pada sektor pertanian akan menjadi semakin kecil dan berbanding terbalik dengan adanya pertumbuhan industrialisasi dan modernisasi ekonomi. Transformasi sosial dapat ditinjau melalui pendistribusian kemakmuran melalui pemerataan memperoleh akses terhadap sumber daya sosial-ekonomi, contohnya seperti pendidikan, dari segi kesehatan, segi perumahan, terhadap air bersih, fasilitas rekreasi, dan juga partisipasi dalam proses pembuatan keputusan politik. Sedangkan dalam hal transformasi budaya sering dikaitkan, antara lain, dengan bangkitnya semangat kebangsaan dan nasionalisme, disamping itu adanya perubahan nilai dan norma yang dianut oleh masyarakat, seperti perubahan dan spiritualisme ke materialism atau sekularisme. Pergeseran dari penilaian yang tinggi itulah kepada penguasaan materi, dari kelembagaan tradisional menjadi organisasi yang modern dan rasional.

Kemudian, proses pembangunan itu terjadi terhadap segala aspek kehidupan masyarakat, serta ekonomi, juga sosial, budaya, dan politik, yang berlangsung pada level makro (nasional) dan mikro (*community/group*). Makna penting dari

pembangunan adalah dengan adanya kemajuan ataupun perbaikan (*progress*), pertumbuhan dan diversifikasi.

Sebagaimana dikemukakan oleh beberapa para ahli tersebut, Pembangunan yaitu semua proses dari perubahan yang dilakukan melalui upaya-upaya secara sadar tersusun dan sudah terencana. Sedangkan perkembangan dimaknai sebagai proses perubahan yang terjadi secara alamiah sebagai dampak dari adanya pembangunan (Riyadi dan Deddy Supriyadi Bratakusumah, 2005).

Dengan semakin meningkatnya kompleksitas kehidupan masyarakat yang menyangkut berbagai aspek kehidupan, pemikiran tentang modernisasi pun tidak lagi hanya saja mencakup dalam bidang ekonomi dan industri, melainkan telah merambah ke seluruh aspek yang ada yang dapat mempengaruhi kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, modernisasi diartikan sebagai proses transformasi dan perubahan dalam masyarakat yang meliputi segala aspeknya, baik ekonomi, industri, sosial, budaya, dan sebagainya.

Oleh karena itu dalam proses modernisasi itu sendiri terjadi suatu proses perubahan yang tentunya mengarah pada perbaikan, para ahli manajemen pembangunan yang menganggapnya sebagai salah satu dari suatu proses pembangunan di mana terjadinya proses perubahan dari kehidupan tradisional yang menjadi kehidupan modern, yang pada awal mulanya ditandai dengan adanya penggunaan alat-alat tradisional dengan menggantikan ke alat-alat yang modern.

Selanjutnya seiring dengan berjalannya waktu perkembangan, ilmu pengetahuan, termasuk ilmu-ilmu sosial, para ahli manajemen pembangunan terus

berupaya untuk menggali terkait konsep-konsep pembangunan secara ilmiah. Sederhananya pembangunan sering dimaknai sebagai suatu upaya untuk melakukan perubahan menjadi ke lebih baik lagi. Karena dengan adanya perubahan yang dimaksud adalah untuk menuju arah peningkatan dari keadaan semula, tidak jarang pula ada yang mengasumsikan bahwa pembangunan sebagai bagian dari pertumbuhan. Seiring dengan perkembangannya terkait pembangunan hingga saat ini belum ditemukan adanya suatu kesepakatan yang dapat menolak asumsi tersebut. Akan tetapi untuk dapat membedakan keduanya tanpa harus memisahkan secara tegas batasannya, Menurut Siagian dalam bukunya Administrasi Pembangunan mengemukakan, “Pembangunan sebagai suatu perubahan, mewujudkan suatu kondisi kehidupan bernegara dan bermasyarakat yang lebih baik dari kondisi sekarang, sedangkan pembangunan sebagai suatu pertumbuhan menunjukkan kemampuan suatu kelompok untuk terus berkembang, baik secara kualitatif maupun kuantitatif dan merupakan sesuatu yang mutlak harus terjadi dalam pembangunan.”

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa pada dasarnya pembangunan tidak dapat dipisahkan dari pertumbuhan, dalam arti bahwa pembangunan dapat menyebabkan terjadinya pertumbuhan dan pertumbuhan akan terjadi sebagai akibat adanya pembangunan. Dalam hal ini pertumbuhan dapat berupa pengembangan/perluasan (*expansion*) atau peningkatan (*improvement*) dari aktivitas yang dilakukan oleh suatu komunitas masyarakat.

5. Konsep Lembaga Kemasyarakatan

Selanjutnya Soemantri (2011:16) memberikan pengertian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa atau disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra Pemerintah Desa dalam memberdayakan masyarakat. Pembentukan dari Lembaga Kemasyarakatan Desa (LKMD), itu sendiri ditetapkan dalam Peraturan Desa.

1. Tugas dan Fungsi

Lembaga Kemasyarakatan mempunyai tugas :

- a) Menyusun rencana pembangunan secara partisipatif
- b) Melaksanakan, mengendalikan, memanfaatkan, memelihara, dan mengembangkan pembangunan secara partisipatif
- c) Menggerakkan dan mengembangkan partisipasi, gotong-royong, dan swadaya masyarakat.
- d) Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat dalam rangka pemberdayaan masyarakat.

Lembaga Kemasyarakatan (LKMD), mempunyai beberapa fungsi :

- a) Sebagai tempat Penampungan dan juga penyaluran aspirasi-aspirasi masyarakat dalam pembangunan ;
- b) Sebagai tempat Penanaman dan pemupukan rasa persatuan dan kesatuan masyarakat dalam rangka memperkokoh Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) ;
- c) Untuk Peningkatan kualitas dan percepatan pelayanan pemerintah kepada masyarakat;
- d) Dalam Menyusun rencana, pelaksanaan, pelesatrian, dan pengembangan hasil-hasil pembangunan secara partisipatif;
- e) Sebagai tempat Penumbuhkembangkan dan penggerak prakarsa, partisipasi, serta swadaya gotong royong masyarakat;
- f) Untuk menciptakan Pemberdayaan dan peningkatan kesejahteraan keluarga;
- g) Untuk menciptakan Pemberdayaan hak politik masyarakat

Kegiatan Lembaga Kemasyarakatan bertujuan untuk mempercepat

terwujudnya kesejahteraan melalui beberapa cara:

- a) Kegiatan dalam hal peningkatan pelayanan masyarakat;

- b) Kegiatan dalam hal peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan;
- c) Kegiatan dalam hal pengembangan kemitraan;
- d) Kegiatan terkait hal pemberdayaan masyarakat; dan
- e) Kegiatan terkait pengembangan kegiatan lain sesuai dengan kebutuhan dan kondisi masyarakat setempat.

2. Kepengurusan

Pengurus lembaga kemasyarakatan dipilih secara musyawarah dari anggota masyarakat yang susunan dan jumlah pengurusannya disesuaikan dengan kebutuhan yang memenuhi persyaratan sebagai berikut :

- a. Warga Negara Republik Indonesia
- b. Penduduk setempat
- c. Mempunyai kemauan, kemampuan dan kepedulian
- d. Dipilih secara musyawarah dan mufakat

Tjondronegoro dalam Koenjaranigrat, dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015:83) menyebutkan lembaga adalah badan yang lebih nyata dengan bangunan, pola organisasi dan segala peralatan (*attribute*) dibutuhkan dapat menjalankan fungsinya. Dalam kenyataannya memang lembaga menyangkut segi yang berakar norma sosial dan berhubungan dengan peralatan dan perlambangan (*Symbols*).

Lembaga kemasyarakatan adalah himpunan dari pada norma-norma dari segala tingkatan yang berkisar pada suatu kebutuhan pokok dalam kehidupan masyarakat, wujud yang konkrit dari lembaga kemasyarakatan tersebut adalah asosiasi menurut soekanto dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015:81).

Ciri-ciri umum kelembagaan masyarakatan menurut Gillin dan Gillin dalam Soekanto dalam Rahyunir Rauf dan Yusri Munaf (2015:83) adalah :

- a. Suatu lembaga kemasyarakatan adalah organisasi pola-pola pemikiran perilaku yang terwujud melalui aktifitas dan hasil-hasilnya.
- b. Suatu tingkat kekekalan tertentu merupakan ciri-ciri dari semua lembaga kemasyarakatan.
- c. Lembaga kemasyarakatan mempunyai satu atau beberapa tujuan tertentu.
- d. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai alat-alat perlengkapan.
- e. Lembaga kemasyarakatan juga mempunyai lambing-lambang sebagai ciri khas.
- f. Lembaga kemasyarakatan mempunyai tradisi tertulis maupun tidak tertulis.

Proses pemberdayaan terhadap masyarakat yang diharapkan tentunya agar dapat menjadikan masyarakat tersebut menjadi lebih berdaya kembali, berkekuatan dan juga berkemampuan. Kaitannya dengan indikator masyarakat berdaya, Sumardjo (1999) mengidentifikasi ada beberapa ciri masyarakat yang berdaya yaitu:

1. Mampu memahami diri dan potensinya sendiri, mampu merencanakan perubahan- perubahan kedepannya(mengantisipasi kondisi perubahan kedepan);
2. Mampu mengarahkan dirinya sendiri kearah yang lebih baik lagi
3. Memiliki kekuatan untuk berunding yang baik;
4. Memiliki bargaining power yang memadai dalam melakukan kerja sama yang saling menguntungkan, dan juga
5. Bertanggung jawab atas tindakannya sendiri yang dilakukan nantinya.

Selanjutnya pendapat dari Sumodiningrat berarti pemberdayaan melalui suatu masa proses pembelajaran, sehingga mencapai status mandiri yang baik. Proses pemberdayaan masyarakat semestinya juga harus didampingi oleh suatu tim fasilitator yang bersifat multi disiplin. Tim pendamping ini yang merupakan salah satu eksternal faktor dalam pemberdayaan masyarakat. Peran tim pada awal proses memang sangat aktif akantetapi lama-lama akan berkurang secara bertahap selama proses berjalan sampai masyarakat sudah mampu melanjutkan kegiatannya sampai mandiri. Dalam operasionalnya inisiatif tim pemberdayaan masyarakat tersebut akan pelan-pelan dikurangi dan hingga akhirnya berhenti. Peran tim sebagai fasilitator

akan dipenuhi oleh pengurus kelompok ataupun pihak lain yang dianggap mampu oleh masyarakat itu sendiri.

1. Kebijakan Pemerintah mengenai hal Pemberdayaan Masyarakat secara tegas dirumuskan di dalam Tap MPR NO.IV /MPR/1999 tentang GBHN dan UU no.22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Desa.
2. Rumusan kebijakan tersebut menegaskan bahwa antara kebijakan pemberdayaan Masyarakat dan penyelenggara Pemerintah Desa dan Lembaga Kemasyarakatan Desa.
3. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 secara eksplisit mengatur ketentuan penyelenggaraan Pemerintahan Desa dan Lembaga Kemasyarakatan.
4. Dalam penjelasan pasal 108 Undang-Undang yang dimaksud dinyatakan bahwa di desa dengan dibentuk lembaga lainnya sesuai dengan kebutuhan desa dan ditetapkan dengan peraturan desa . Lembaga yang dimaksud merupakan mitra pemerintah Desa dalam rangka Pemberdayaan Masyarakat Desa.
5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor.49 A Tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain. Dalam salah satu pasalnya antara lain menyebutkan bahwa: penggunaan nama LKMD atau sebutan lain ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan kondisi sosial budaya masyarakat.
6. Dalam temu LKMD Tingkat Nasional telah dideklarasikan nama Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) menjadi Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM).

LANDASAN HUKUM

1. Undang - Undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Desa.
2. Undang - Undang Nomor 25 Tahun 1999 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Daerah.
3. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 tahun 2001 Tentang Penataan Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa atau sebutan lain.
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 1999 Tentang Pedoman Pengaturan Mengenai Desa.
5. Perda Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2000 Tentang Lembaga Kemasyarakatan Di Desa.
6. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 450 Tahun 2002 Tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Kabupaten Ciamis Nomor 15 Tahun 2000.

TUJUAN

- Meningkatnya kesadaran masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara di dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.;
- Meningkatnya partisipasi masyarakat dalam perencanaan, serta pelaksanaan, dan pengendali pembangunan.;
- Meningkatnya kemampuan masyarakat sebagai Sumber Daya Manusia (SDM) untuk mengolah dan memanfaatkan potensi Sumber Daya Alam (SDA) terutama dalam bidang Agrobisnis dan Pariwisata.;
- Meningkatnya ekonomi kerakyatan dalam upaya pengentasan kemiskinan.

Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) adalah perubahan nama dari Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa (LKMD) yang sesuai dengan keputusan temu LKMD di tingkat nasional pada tanggal 21 Juli Tahun 2001 yang berlokasi di Bandung.

Tipe-tipe Lembaga Kemasyarakatan

1. Dari sudut perkembangannya dibedakan menjadi *Crescive institution* dan *Enacted institution*. *Crescive institution* disebut sebagai lembaga primer yaitu lembaga yang tak sengaja tumbuh dari adat istiadat masyarakat. *Enacted institution* yaitu lembaga kemasyarakatan yang sengaja dibentuk untuk tujuan tertentu.
2. Dari sudut sistem nilai-nilai yang diterima masyarakat, dibagi menjadi *Basic institution* Dan *Subsidiary institution*. *Basic institution* adalah lembaga kemasyarakatan untuk memelihara tata tertib dalam masyarakat. Sedangkan *Subsidiary institution* adalah lembaga kemasyarakatan yang kurang penting.

3. Dari sudut penerimaan masyarakat di bagi menjadi *Social Sanctioned-institution (Approved)* dan *Unsanctioned-institution*. *Social Sanctioned-institution* adalah lembaga yang diterima masyarakat. Sedangkan *Unsanctioned-institution* adalah lembaga yang ditolak masyarakat.
4. Dari sudut penyebarannya dibagi menjadi *general institution* dan *restricted institution*. *general institution* adalah lembaga kemasyarakatan yang dikenal masyarakat di dunia. Sedangkan *restricted institution* adalah lembaga kemasyarakatan yang dianut oleh masyarakat tertentu.
5. Dari sudut fungsinya dibagi menjadi *Operative institution* dan *Regulative institution*. *Operative institution* adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi menghimpun pola-pola atau tata cara yang diperlukan untuk mencapai tujuan lembaga. Sedangkan *Regulative institution* adalah lembaga kemasyarakatan yang berfungsi untuk mengawasi adat istiadat atau tata kelakuan yang tidak menjadi bagian yang mutlak dari lembaga.

Contoh lembaga kemasyarakatan yang ada di desa :

1. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan wadah bagi generasi muda untuk mengekspresikan jiwa mudanya. Disamping di tingkat desa di masing-masing pedukuhan juga terdapat karang taruna tingkat dusun dengan kegiatan tergantung dari program kerja karang taruna tingkat dusun.

2. LPMD (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa)

Lembaga ini berkedudukan ditingkat desa yang berperan dalam rangka ikut memperlancar program-program pembangunan ditingkat desa.

3. GaPokTan (Gabungan Kelompok Tani)

Merupakan wadah bagi kelompok tani ditingkat desa, kegiatan yang menjadi rutinitas adalah pertemuan kelompok tani tingkat desa yang dilaksanakan secara bergilir setiap bulan di masing-masing kelompok tani. Kegiatan yang dilakukan :

- Pendampingan Program Aksi MANDIRI PANGAN
- Pengelolaan PUAP (Program Usaha Agribisnis Perdesaan)

4. POSYANDU (Pos Pelayanan Terpadu)

Kegiatanposyandu meliputi penimbangan rutin bagi balita dan lansia, pemberian makanantambahan bagi balita dan lansia, penyuluhan kesehatan bagi balita dan lansia.

5. FORKESDES (Forum Kesehatan Desa)/ DESA SIAGA

Forum ini berkedudukan di tingkat desa, yang merupakan sarana untuk membahas masalah-masalah kesehatan ditingkat desa. Kesehatan yang dimaksud disini termasuk kesehatan lingkungan. Forum ini terbentuk pada tahun 2007 hal tersebut didasari pada banyaknya masalah-masalah kesehatan

ditingkat pedukuhan yang tidak dapat Secara maksimal. Sehingga dengan adanya forum ini akan lebih mendorong terwujudnya desa yang sehat salah satunya adalah penanganan masalah gizi buruk.

Fasilitas Kesehatan yang ada di desacontohnya :

1. POSKESTREN (Pos Kesehatan Pondok Pesantren)
2. POLINDES (Pondok Bersalin Desa)
3. PUSTU (Puskesmas Pembantu)
4. POSYANDU BALITA
5. POSYANDU LANSIA
7. GERAKAN SAYANG IBU
8. PKK (Pemberdayan Keluarga)
9. PPMD (Pos Penanggulangan Malaria Desa)
10. BAZIS (Lembaga ini yang mengkoordinir kegiatan-kegiatan keagamaan dalam rangka untuk membina kerukunan umat beragama dan pembinaan mental spiritual bagi warga masyarakat desa)

6. Konsep Pemerintah Daerah

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah Pasal 1 poin 2 dan 3: Pemerintahan Daerah yakni suatu penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan juga tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem serta prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagaimana yang dimaksud didalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Sedangkan Pemerintah Daerah yaitu Kepala Daerah yang juga merupakan sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintah Daerah yang

memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom tersebut.

Setiap Pemerintah Daerah tentunya dipimpin oleh Kepala Daerah yang dipilih secara demokratis. Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, untuk Provinsi disebut Wakil Walikota. Kepala dan Wakil Kepala Daerah memiliki tugas, wewenang, dan kewajiban serta larangan. Kepala daerah juga mempunyai kewajiban untuk memberikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada pemerintah, dan memberikan laporan keterangan pertanggung jawaban kepada DPRD, serta menginformasikan laporan penyelenggaraan pemerintahan daerah kepada masyarakat.

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah adalah Gubernur, Bupati dan Walikota dan Perangkat Daerah lainnya yang menjadi sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah(DPRD) adalah lembaga perwakilan rakyat daerah dimana termasuk sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah itu sendiri. Sedangkan pengertian dari Peraturan Daerah selanjutnya disebut Perda adalah peraturan daerah provinsi dan/atau peraturan daerah kabupaten/kota.

Dari pengertian diatas dapat dipahami bahwa Pemerintahan Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota adalah termasuk kedalam daerah yang diberikan hak otonomi untuk mengatur dan mengurus rumah tangga daerah nya sendiri.

Pemerintah daerah untuk mewujudkan kesejahteraan umum sebagai tujuan Negara perlu melakukan upaya-upaya, diantaranya dengan mengeluarkan kebijakan-

kebijakan untuk mengatur berbagai aspek kehidupan bernegara sehingga tujuan Negara dapat terwujud. Dengan adanya kebijakan pemerintah yang berarti peraturan yang mengatur aspek-aspek kehidupan masyarakat Negara diharap apa yang menjadi tujuan dari penyelenggaraan Negara dapat tercapai.

7. Konsep Pemerintah Desa

Pemerintah Desa berdasarkan Undang - Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah desa dimaknai sebagai kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yuridiksi, yang berwenang untuk mengatur dan juga mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul serta adat istiadat setempat yang diakui dan/atau dibentuk dalam sistem pemerintahan nasional dan berada dikabupaten/kota, sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, serta partisipasi, otonomi asli, juga termasuk demokratisasi, dan terakhir yakni pemberdayaan masyarakat.

Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, mengakui bahwa otonomi yang dimiliki oleh pemerintah desa ataupun dengan sebutan lainnya dan kepada desa melalui pemerintah desa diberikanlah penugasan ataupun yang disebut dengan pendelegasian dari pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan pemerintahan tertentu.

Sebagai perwujudan demokrasi sesuai dalam ketentuan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 maka pemerintahan dalam tatanan pemerintah desa dibentuk Badan Permusyawaratan Desa (BPD) atau sebutan lain yang disesuaikan dengan budaya yang berkembang yang ada di desa bersangkutan tersebut, yang berfungsi juga sebagai lembaga pengatur dan pengontrol dalam penyelenggaraan pemerintah desa, contohnya seperti pembuatan dan pelaksanaan Peraturan Desa, Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, dan Keputusan Kepala Desa. Di desa dibentuk juga lembaga kemasyarakatan yang berkedudukan sebagai mitra kerja pemerintah desa dalam memberdayakan masyarakat desa setempat.

Selanjutnya pemerintah desa disebut juga sebagai kepala desa beserta perangkat desa dan anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD). Kepala desa pada dasarnya bertanggung jawab kepada rakyat desa yang ada dalam tata cara dan prosedur pertanggung jawabannya disampaikan kepada Bupati atau Walikota melalui Camat setempat. Kepada Badan Permusyawaratan Desa (BPD), Kepala Desa wajib memberikan keterangan laporan terkait pertanggung jawabannya dan kepada rakyat menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggung jawabannya namun tetap harus memberi peluang kepada masyarakat melalui Badan Permusyawaratan Desa (BPD) untuk menanyakan dan/atau meminta keterangan lebih lanjut terhadap hal-hal yang bertalian dengan pertanggung jawaban dimaksud. Dan juga harus sesuai dengan Peraturan Pemerintahan Nomor 72 Tahun 2005 Bab IV pasal 11 pemerintah desa terdiri dari Pemerintah Desa dan BPD.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005 Tentang definisi Desa yaitu kesatuan masyarakat hukum yang tentunya memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Maupun sebaliknya Pemerintah Desa adalah penyelenggara urusan pemerintahan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dan juga dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Oleh karena itu Pemerintah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintah desa. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan BPD, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintah desa sebagai unsur dari penyelenggara pemerintah desa.

Alokasi Dana Desa yaitu dana yang dialokasikan oleh Pemerintah Kabupaten/Kota untuk desa, yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan pemerintah desa yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Desa dan BPD, yang tentunya ditetapkan dengan Peraturan Desa. Kemudian Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang dibuat oleh BPD bersama dengan Kepala Desa.

8. Konsep Analisis

Analisis dapat juga dipahami sebagai usaha dalam mengamati sesuatu secara mendetail dan terkonsep dengan cara menguraikan beberapa komponen-komponen yang didapatkan dalam pembentuknya atau menyusun komponen tersebut untuk dikaji lebih lanjut nantinya.

Kata analisis atau analisa berasal dari bahasa Yunani Kuno, yaitu “analisis” yang artinya melepaskan. Beberapa ahli pernah menjelaskan mengenai arti analisis, diantaranya adalah:

1. Komaruddin

Komaruddin, memberikan pengertian analisis adalah sebagai aktivitas berfikir untuk menguraikan suatu keseluruhan dan menjadi suatu komponen-komponen kecil sehingga dapat mengenali tanda-tanda komponen, hubungan antar masing-masing komponen, dan fungsi dari setiap komponen dalam satu keseluruhan yang terpadu dan terperinci .

2. Wiradi

Selanjutnya Wiradi, mengartikan analisis adalah yakni aktivitas yang memuat kegiatan-kegiatan memilah yang mengurai, dan membedakan sesuatu yang kemudian digolongkan dan dikelompokkan menurut kriteria tertentu lalu dicari makna dan kaitannya masing-masing komponen.

3. Dwi Prastowo Darminto

Kemudian Dwi Prastowo Darminto, mendefinisikan pengertian analisis adalah yaitu penguraian suatu pokok atas dari berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta menghubungkan hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman arti keseluruhan dari penguraian tersebut.

4. Syahrul

Pengertian analisis dalam akuntansi yang didefinisikan oleh Syahrul adalah merupakan kegiatan melakukan evaluasi terhadap kondisi dari pos-pos atau ayat-ayat yang berkaitan dengan akuntansi dan alasan-alasan yang memungkinkan tentang perbedaan yang muncul.

5. Rifka Julianty

Menurut Rifka Julianty, memberikan pengertian analisis adalah terkait aktivitas penguraian pada pokok-pokok atas berbagai bagiannya dan penelaahan bagian itu sendiri, serta mendapatkan hubungan antara bagian untuk mendapatkan sebuah pengertian yang tepat dan akurat dan mendapatkan pemahaman yang baru dengan arti keseluruhannya.

6. Mohammad Afdi Nizar

Mohammad Afdi Nizar, pengertian analisis dalam akuntansi adalah evaluasi mengenai kondisi dari ayat-ayat yang berhubungan dengan langsung dengan akuntansi dan alasan yang memungkinkan sebuah perbedaan sendiri akan muncul.

7. Robert J. Schreiter

Menurut Robert J. Schreiter berpendapat bahwa pengertian analisis adalah “membaca” teks yang melokalisasikan berbagai tanda dan menempatkan tanda-tanda

tersebut kedalam interaksi yang dinamis, dan pesan-pesan yang disampaikan secara tepat.

8. Minto Rahayu

Menurut Minto Rahayu, arti analisis adalah sebuah cara dimana dalam membagi suatu subjek ke dalam komponen-komponen, meliputi terdiri dari melepaskan,serta menanggalkan, dan terakhir menguraikan sesuatu yang terikat padu menjadi satu.

6. Husein Umar

Husein Umar, memberikan pengertian analisis adalah merupakan bagian dari suatu proses kerja dari rangkaian tahapan pekerjaan sebelum ketahap riset, lalu didokumentasikan dengan tahapan pembuatan laporan nantinya

B. Penelitian Terdahulu

Tabel II.I : Kajian Penelitian Terdahulu

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Aditya Wiratama	Evaluasi tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Tanah Merah Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan(LKMD)	1. Penelitian tahun 2015 2. Lokasi Desa Tanah Merah Membahas tentang pelaksanaan tugas LPM
2	Hendi Selwa	Evaluasi tentang bagaimana	Sama-sama meneliti tentang Lembaga	1. Penelitian tahun 2014

		proses Pelaksanaan Tugas Rukun Tetangga di Desa Empang Baru Kecamatan Lubuk Dalam Kabupaten Siak	Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKMD) / Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM)	2. Lokasi Desa Empang Baru 3. Membahas tentang Pelaksanaan Tugas LPM
3	Guwon Rio Wibowo	Evaluasi sejauh mana tahapan Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa di Desa Kualu Kecamatan Tambang Kabupaten Kampar	Sama-sama meneliti tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat/ Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKMD)	1. Lokasi Desa Kualu Membahas mengenai Evaluasi Pelaksanaan Tugas LPM

Sumber: Data Olahan Penulis

Pada tabel diatas dapat dijelaskan bahwa penelitian yang dilakukan oleh Aditia Wiratama, Hendi Selwa, dan Guwon Rio Wibowo menggunakan metode kuantitatif dan teknik pengukuran menggunakan baik, cukup baik dan kurang baik. Sedangkan metode yang digunakan oleh peneliti kualitatif dan teknik pengukuran menggunakan ya dan tidak.

Berdasarkan penelitian terdahulu terkait LPM bahwa terdapat perbedaan dalam penelitian saya dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian saya membahas tentang analisis terkait program yang dilaksanakan oleh LPM itu sendiri baik dari segi pembangunan dan lain lainnya, juga saya membahas tentang bagaimana program itu dapat selesai sesuai dengan target dan bagaimana indikasi dalam

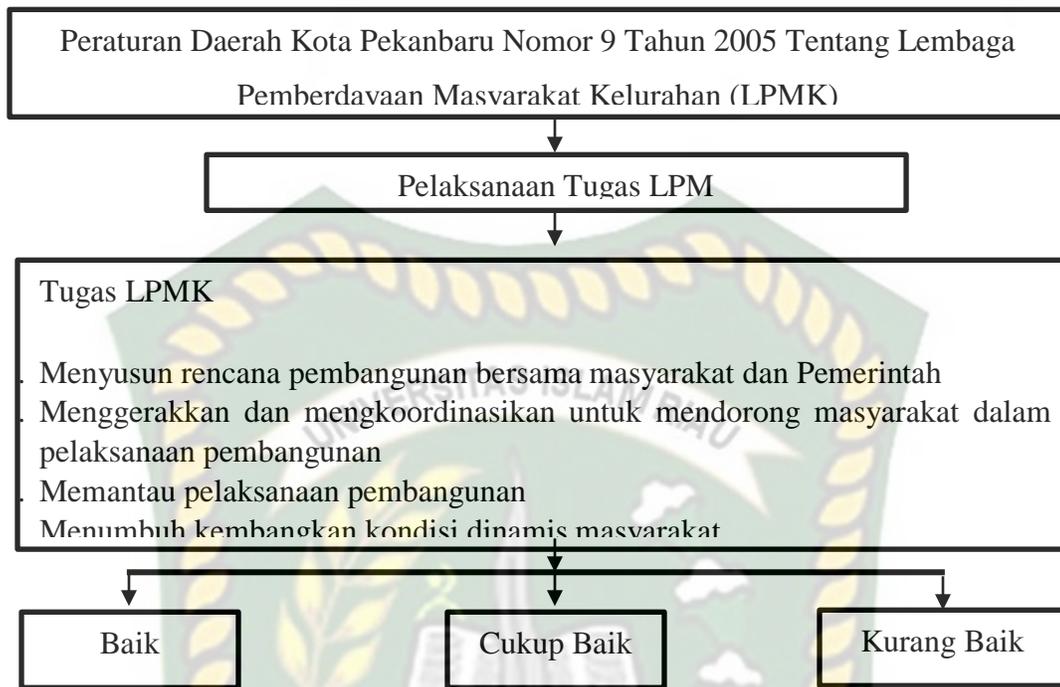
permasalahan itu bisa terjadi. Dalam peneliti terdahulu mereka menggunakan teori evaluasi untuk mendapatkan hasil yang valid tanpa menanyakan manfaat atau nilai dari hasil kebijakan tersebut dan juga mereka menggunakan metode *before-after* yaitu perbandingan antara sebelum dan sesudah tindakan dan tolak ukurnya *before* atau sebelum Tindakan, sedangkan penulis menggunakan teori analisis dan mendata bagaimana dan dengan cara apa untuk menyelesaikan suatu permasalahan hingga mendapatkan hasil yang jelas tanpa adanya perbandingan baik sesudah dan sebelum serta untuk mendapatkan manfaat.

C. Kerangka Pikir

Dalam kerangka pikir ini dijelaskan tentang keterkaitan antara konsep maupun teori-teori yang dianggap relevan dalam menganalisis dan memecahkan masalah yang dihadapi dengan variable penelitian beserta indikator-indikator terkait. Sebagaimana yang telah dikemukakan bahwa penelitian ini bermaksud untuk mengevaluasi tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak. Dalam kaitan ini penulis ingin mengetahui sejauh mana tingkat keterlaksanaan tugas dari LPM yang termasuk dalam Perda Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan(LPMK).

Oleh sebab itu, kerangka pikir mengenai analisis pelaksanaan tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak dapat dijelaskan pada gambar dibawah ini:

Gambar II.1 Kerangka Pikir Penelitian Tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak



Sumber: Modifikasi Peneliti 2020

D. Konsep Operasional

Untuk memberi suatu pemahaman agar memudahkan penelitian, maka perlu adanya beberapa batasan penelitian dan focus penelitian ini yang di operasionalkan melalui indikator sebagai berikut :

1. Analisis adalah penguraian dari suatu pokok atas berbagai bagiannya dan penelaah bagian itu sendiri serta hubungan antar bagian untuk memperoleh pengertian yang tepat dan pemahaman dari keseluruhan.

2. Pelaksanaan tugas adalah kesatuan pekerjaan atau kegiatan yang dilaksanakan oleh suatu badan atau wadah secara berencana, teratur dan terarah guna mencapai tujuan yang diharapkan, maupun operasional atau kebijaksanaan menjadi kenyataan guna mencapai sasaran dari program yang ditetapkan semula.
3. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah seperti: renovasi rumah warga dan juga pembangunan ulang rumah warga.
4. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan seperti: memberikan sosialisasi kepada masyarakat terhadap program pembangunan dari LPM.
5. Memantau pelaksanaan pembangunan seperti: melakukan pengecekan terhadap program yang sedang berlangsung selama seminggu sekali.
6. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat seperti: memberikan contoh secara langsung terhadap pembangunan tersebut.

E. Operasional Variable

Untuk lebih jelasnya mengenai operasional variabel mengenai Penyelenggaraan Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak pada tabel di bawah ini:

Tabel. II. 2 : Operasional Variabel Pedoman Pelaksanaan Dalam Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak

Konsep	Variabel	Indikator	Item Penilaian	
1	2	3	4	5

<p>Analisis adalah suatu teknik untuk membuat iferensi-iferensi yang dapat ditiru (repicable) dan sah, dengan memperhatikan konteksnya Kripperdorff (1991:15 dalam Retnoningsih,201 2:35)</p>	<p>Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat</p>	<p>Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah</p>	<p>a. Mendeskripsikan</p> <p>b. perencanaan pembangunan</p> <p>c. Sudahkah terlaksana dengan baik</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p> <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		<p>Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan</p>	<p>a. Membentuk sosialisasi tentang program pembangunan</p> <p>b. Memastikan pelaksanaan sosialisasi berjalan sesuai dengan ketentuan</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p> <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
		<p>Memantau pelaksanaan pembangunan</p>	<p>a. Memastikan pelaksanaan pembangunan secara berkala</p> <p>b. Membentuk tim pemantauan</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p> <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>
1	2	3	4	5
		<p>Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat</p>	<p>a. Menjamin proses pembangunan sesuai dengan target yang telah ditentukan.</p> <p>b. Pelaksanaan pembangunan sesuai dengan aturan yang ditentukan.</p>	<p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p> <p>Baik</p> <p>Cukup Baik</p> <p>Kurang Baik</p>

Sumber: Modifikasi Penulis 2019

F. Teknik Pengukuran

Adapun ukuran yang diberikan kepada masing-masing indikator adalah sebagai berikut:

Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, dapat dilakukan pengukuran variable sebagai berikut:

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori cukup baik berada rentang persentase 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori kurang baik berada pada rentang persentase 0% - 33%

Adapun pengukuran untuk indikator penelitian ini adalah :

1. Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori cukup baik berada rentang persentase 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori kurang baik berada pada rentang persentase 0% - 33%

2. Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori cukup baik berada rentang persentase 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori kurang baik berada pada rentang persentase 0% - 33%

3. Memantau pelaksanaan pembangunan

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori cukup baik berada rentang persentase 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori kurang baik berada pada rentang persentase 0% - 33%

4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat

Baik : Apabila semua indikator pada kategori baik berada pada rentang persentase 67% - 100%

Cukup Baik : Apabila semua indikator pada kategori cukup baik berada rentang persentase 34% - 66%

Kurang Baik : Apabila semua indikator pada kategori kurang baik berada pada rentang persentase 0% - 33%

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Tipe Penelitian

Berdasarkan rumusan penelitian yang ada, tergambar bahwa data dan informasi yang akan dikumpulkan melalui wawancara pada saat melakukan pra survey dijadikan dasar pendeskripsian indikator variable, karena itu tipe penelitian ini di dapat dimasukkan kedalam tipe survey kualitatif yaitu menerangkan atau menguraikan keadaan riil dilapangan yang berhubungan dengan Analisis Penyelenggaraan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat dalam program perencanaan pembangunan yang ada di wilayah di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir Kota Pekanbaru dengan tipe kualitatif merupakan penelitian yang bertolak dari data, memanfaatkan teori yang ada sebagai bahan penjelasan, dan berakhir dengan suatu teori.

Kriyantomo menyatakan bahwa “ riset kualitatif bertujuan untuk menjelaskan fenomena-fenomena dengan sedalam-dalamnya melalui pengumpulan data sedalam-dalamnya”. Penelitian kualitatif menekankan pada kedalaman data yang didapatkan oleh peneliti.

B. Lokasi Penelitian

Dalam menentukan lokasi penelitian kualitatif menurut Moeleong(2004:86) menyatakan cara terbaik ditempuh dengan jalan mempertimbangkan teori substantif dan menjajaki lapangan untuk mencari kesesuaian dengan kenyataan yang ada

dilapangan sementara itu keterbatasan geografis dan praktis seperti waktu, biaya, tenaga perlu juga dijadikan pertimbangan dalam penentuan lokasi penelitian.

Penelitian ini dilakukan pada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak yang berlokasi di Jalan Pesisir Ujung. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui tentang program-program dan perencanaan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ditujukan untuk pembangunan kepada masyarakat agar masyarakat tersebut dapat mendapatkan pemberdayaan dan merasa nyaman atas program dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

C. Key Informan dan Informan

Dalam penelitian kualitatif subjek responden disebut juga subyek “kasus”, ini untuk membedakan dari obyek “cuplikan” (sampel) pada penelitian kuantitatif.

Patton (2000) telah merinci sejumlah pendekatan yang dapat ditempuh dalam memilih subyek kasus tersebut. Peneliti sebenarnya dapat mengatasi masalah-masalah praktis semacam itu dengan cara melakukan penilaian dan negosiasi.

Key informan atau narasumber kunci adalah seorang ataupun beberapa orang, yaitu orang atau orang-orang yang paling banyak menguasai informasi (paling banyak tahu) mengenai objek yang sedang diteliti tersebut, dalam penelitian ini yang merupakan key informan atau narasumber kunci ialah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak yang dianggap menguasai informasi paling banyak dalam penelitian ini.

Informan atau narasumber penelitian adalah seseorang yang, karena memiliki informasi (data) banyak mengenai objek yang sedang diteliti, dimintai

informasi mengenai objek penelitian tersebut. Lazimnya informan atau narasumber penelitian ini ada dalam penelitian yang subjek penelitiannya berupa “kasus” (satu kesatuan unit), antara lain berupa lembaga atau organisasi atau institusi (pranata) sosial, yang merupakan informan dalam penelitian ini adalah Tokoh Masyarakat dan Masyarakat yang dianggap memiliki informasi atau data dalam penelitian ini.

Yang merupakan Key Informan adalah Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak dan Informannya adalah tokoh masyarakat (RT/RW) dan beberapa masyarakat baik yang menerima program maupun tidak. Akan diwawancarai secara langsung oleh peneliti dalam penelitian ini.

D. Teknik Penarikan Data

Penelitian kualitatif menurut Bouma Gary D.(1993) penelitian ini mempercayai bahwa mereka dapat menggunakan pertimbangan atau intuisinya untuk memilih orang-orang atau kelompok terbaik untuk dipelajari atau dalam hal ini memberikan informasi yang akurat.

Teknik penetapan responden yang penulis gunakan adalah teknik wawancara langsung kepada Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Tokoh Masyarakat (RT/RW), dan beberapa masyarakat baik yang menerima program maupun tidak. Teknik ini dilakukan guna untuk memperoleh data agar dapat menyimpulkan hasil dari penelitian tersebut, juga dapat melihat program serta perencanaan pembangunan yang masih berjalan atau tidaknya sesuai dengan Perda tersebut.

E. Jenis dan Sumber Data

1. Data Primer

Yaitu data yang penulis peroleh secara langsung dari para responden, yang mana data tersebut terdiri dari identitas responden seperti nama, umur, pekerjaan, tingkat pendidikan, dan serta hasil tanggapan reponden tentang program dan perencanaan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak dalam pembangunan di Kelurahan Meranti Pandak.

2. Data Sekunder

Yaitu data penulis peroleh dari Kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat yang ada di Kelurahan Meranti Pandak, yang terdiri dari gambaran umum kantor Lembaga Pemberdayaan Masyarakat, Visi dan Misi dan Struktur Organisasi.

F. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Wawancara, menurut Sutopo (2002;58-59) yaitu cara yang dipakai untuk memperoleh informasi melalui kegiatan interaksi sosial antara peneliti dengan yang diteliti. Teknik wawancara merupakan suatu teknik pengumpulan data dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan secara langsung kepada responden yang akan diwawancarai.

2. Observasi atau pengamatan merupakan salah satu teknik penelitian yang sangat penting, pengamatan itu digunakan karena berbagai alasan. Ternyata ada beberapa tipologi pengamatan, terlepas dari jenis pengamatan, dapat dikatakan bahwa pengamatan terbatas dan tergantung pada jenis dan variasi pendekatan,(Meleong, 2007;242).
3. Dokumentasi, menurut Nawawi (2005;133) menyatakan bahwa studi dokumentasi adalah cara pengumpulan data melalui peninggalan tertulis terutama beberapa arsip-arsip dan termasuk juga buku mengenai pendapat, dalil yang berhubungan dengan masalah penyelidikan. Dokumen dalam penelitian sebagai sumber data dimanfaatkan untuk menguji, menafsirkan, bahkan untuk meramalkan (Meleong,2007;217).

G. Instrumen Penelitian

Dalam penelitian kualitatif ini , tentunya yang menjadi instrument atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri sehingga peneliti harus “divalidasi”. Validasi terhadap peneliti, meliputi; pemahaman metode penelitian kualitatif, penguasaan wawasan terhadap bidang yang diteliti dan di analisis, kesiapan peneliti untuk memasuki objek penelitian baik secara akademik maupun logiknya (Sugiono,2009;305).

Peneliti kualitatif sebagai *human instrument* yang berfungsi untuk menetapkan focus dari penelitian itu sendiri, memilih informan yang sesuai sebagai sumber data untuk dikelola, melakukan pengumpulan data dan komponen-komponen

, menilai kualitas data, analisis data yang didapat, menafsirkan data, terakhir dan membuat kesimpulan atas temuannya itu sendiri (Sugiono,2009;306).

Peneliti sebagai instrument atau alat penelitian karena mempunyai ciri-ciri sebagai berikut:

1. Peneliti sebagai alat peka dan dapat bereaksi terhadap segala stimulus dari lingkungan yang harus diperkirakannya baik bermakna atau tidak bagi si penelitian.
2. Peneliti sebagai alat dapat menyesuaikan diri terhadap semua aspek keadaan yang ada dan dapat mengumpulkan aneka ragam data sekaligus.
3. Tiap situasi merupakan keseluruhan artinya tidak ada suatu instrument berupa test atau angket yang dapat menangkap keseluruhan situasi kecuali manusia itu sendiri.
4. Suatu situasi yang melibatkan interaksi manusia tidak dapat dipahami dengan pengetahuan semata dan untuk memahaminya, kita perlu sering merasakannya, mengalaminya berdasarkan pengetahuan kita.
5. Peneliti sebagai instrument dapat segera menganalisis data yang diperolehnya. Ia dapat menafsirkannya sendiri, melahirkan hipotesis dengan segera untuk menentukan arah pengamatannya, untuk mentest hipotesis yang timbul seketika.
6. Hanya manusia sebagai instrument dapat mengambil kesimpulan berdasarkan data yang dikumpulkan pada suatu saat dan menggunakannya segera sebagai bahan untuk memperoleh penegasan, serta perubahan, perbaikan, atau perlakuan (Sugiono, 2009;308).

Menurut Suharsimi Arikunto mengatakan Instrumen penelitian adalah alat bantu yang dipilih dan digunakan oleh peneliti dalam melakukan kegiatannya untuk mengumpulkan data agar kegiatan tersebut menjadi sistematis dan dipermudah olehnya.

H. Teknik Analisa Data

Menurut Meleong (2007;280) Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori, dan uraian dasar. Definisi tersebut memberikan gambaran tentang betapa pentingnya kedudukan analisis data dilihat dari segi tujuan penelitian. Prinsip pokok penelitian kualitatif adalah menemukan teori dari data. Selanjutnya data yang telah dianalisis, dijelaskan dan dimaknai dalam bentuk kata-kata untuk mendiskripsikan fakta yang ada dilapangan, pemaknaan atau untuk menjawab pertanyaan penelitian yang kemudian diambil intinya saja. Berdasarkan keterangan diatas maka setiap tahap dalam proses tersebut dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data dengan menelaah seluruh data yang ada dari berbagai sumber yang telah didapat dari lapangan, dokumen pribadi, dokumen resmi, gambar, foto, dan lain sebagainya melalui metode wawancara yang didukung dengan studi dokumentasi.

I. Jadwal Kegiatan Penelitian

Tabel III. 1 : Jadwal dan waktu penelitian tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diKelurahan Meranti Pandak

No	Jenis Kegiatan	Bulan/Minggu																				
		Feb-Mar 2019				Juni 2020				Juli 2020				Agustus 2020				Sept 2020				
		3	4	1	2	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	
1.	Penyusunan UP																					
2.	Seminar UP																					
3.	Revisi UP																					
4.	Revisi Data Wawancara																					
5.	Rekomendasi Survei																					
6.	Wawancara																					
7.	Analisis Data																					
8.	Penyusunan Laporan Hasil Penelitian (skripsi)																					
9.	Konsultasi Skripsi																					
10.	Ujian Konfrehensif																					
11.	Revisi Skripsi																					
12.	Penggadaan Skripsi																					

Sumber: Hasil Modifikasi Penulis Tahun 2019

J. Rencana Sistematika Laporan Skripsi

Adapun sistematika penulisan usulan penelitian dalam bentuk skripsi ini dibahas dalam 6 BAB, dimana pembahas-pembahas setiap BAB mempunyai kaitan antara satu dengan yang lainnya yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada BAB ini dimulai dengan Latar Belakang masalah, dalam uraian berikutnya dibahas untuk mengenai perumusan masalah, serta tujuan dan kegunaan penelitian.

BAB II : STUDI KEPUSTAKAAN DAN KERANGKA PIKIRAN

Pada BAB ini merupakan landasan teori untuk dapat melakukan pembahasan skripsi lebih lanjut yang mana berbagai teori yang berhubungan dengan penelitian ini, selanjutnya nantinya akan diuraikan kerangka pikiran, hipotesis, konsep operasional, konsep variable penelitian dan teknik pengukuran penelitian.

BAB III : METODE PENELITIAN

Pada BAB ini terdiri dari tipe penelitian, lokasi penelitian, populasi dan sampel penelitian, teknik penarikan sampel, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, teknik analisis data, jadwal dan waktu kegiatan penelitian serta sistematika penulisan skripsi.

BAB IV : DESKRIPSI LOKASI PENELITIAN

Pada BAB ini memuat tentang gambaran umum tentang Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

BAB V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB ini terdiri dari hasil penelitian dan hasil pembahasan, yang dilakukan oleh penulis yaitu tentang Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru.

BAB VI : PENUTUP

Pada BAB ini merupakan BAB penutup, penulis membagikannya kedalam dua sub yaitu kesimpulan dan saran.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

A. Gambaran Umum Kelurahan Meranti Pandak

1. Keadaan Geografis

Kecamatan di wilayah Kota Pekanbaru, terdiri dari 68 RW dan 285 RT. Luas Wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir adalah 157,33 km² dengan luas masing-masing kelurahan sebagai berikut :

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| a. Meranti Pandak | : 2,01 km ² |
| b. Limbungan | : 2,48 km ² |
| c. Lembah Sari | : 9,77 km ² |
| d. Lembah Damai | : 4,32 km ² |
| e. Limbungan Baru | : 2,09 km ² |
| f. Tebing Tinggi Okura | : 134,79 km ² |

Sesuai dengan adanya data diatas dapat kita lihat bahwa Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan wilayah yang terluas diantara Kelurahan lainnya yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru

Kemudian dapat dijelaskan batasan-batasan wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir pada tabel dibawah ini :

Tabel IV.1 : Batas-batas wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir

No	BATAS	KELURAHAN	KECAMATAN
1	Utara	Khayangan	Rumbai Pesisir
2	Selatan	Sungai Siak	Rumbai Pesisir
3	Timur	Jl.Sembilang	Rumbai Pesisir
4	Barat	Jl.Yos Sudarso	Rumbai Pesisir

Sumber: Dokumen Kelurahan Meranti Pandak, 2020

Selanjutnya penulis akan memaparkan jarak dari Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan rumbai ke Ibukota Kabupaten/Kota pada table dibawah ini:

Tabel IV. 2 : Jarak dari Kelurahan ke Ibukota Kecamatan, Ibukota kabupaten dan Ibukota Provinsi I Kabupaten/ Kota

Kelurahan	Jarak ke Ibukota (km ²)		
	Kel. Meranti Pandak	Kantor Camat	Kantor Walikota
±3 km		±7 km	±7 km

Sumber: Dokumen Kelurahan Meranti Pandak, 2020

Pada tabel IV.3 penulis akan memaparkan pembagian RT/RW yang terdapat pada Kecamatan Rumbai Pesisir:

Tabel IV. 3 : Pembagian RT/RW Kecamatan Rumbai Pesisir

No	KELURAHAN	RT	RW
1	2	3	4

1	Meranti Pandak	54	13
2	Limbangan	52	12
1	2	3	4
3	Lembah Sari	54	14
4	Lembah Damai	38	10
5	Limbangan Baru	74	13
6	Tebing Tinggi Okura	35	11

Sumber: Dokumen Kecamatan Rumbai Pesisir, 2017

Jumlah penduduk Kecamatan Rumbai Pesisir mencapai 66.876 jiwa. Angka ini mengalami peningkatan sebesar 770 jiwa dari tahun sebelumnya. Kepadatan penduduknya mencapai 58.267 jiwa/km², dengan Kelurahan terpadat yaitu Kelurahan Limbungan baru yang penduduknya sebesar 20939 jiwa, dengan kepadatan penduduknya mencapai 9.601 jiwa/km². Dan Kelurahan Tebing Tinggi Okura merupakan kelurahan yang penduduknya terendah yaitu sebesar 5.189 jiwa dengan kepadatan penduduknya sebesar 38 jiwa/km².

2. Keadaan Alam

Kondisi iklim di wilayah Kelurahan Meranti Pandak secara umum seperti biasanya yaitu beriklim tropis dengan dua arah angin yang secara signifikan berpengaruh terhadap pola kejadian hujan di wilayah ini. Musim hujan biasanya terjadi pada bulan September s/d Februari yang bisa juga menyebabkan banjir tahunan selama kurang lebih 1 bulanan sedangkan musim kemarau biasanya terjadi pada bulan Maret s/d Agustus.

Berdasarkan pencatatan BMKG Pekanbaru, Temperature udara rata-rata di Kelurahan Meranti Pandak $27,2^{\circ}\text{C}$, dengan temperature minimum $27,2^{\circ}\text{C}$ dan maksimum $34,5^{\circ}\text{C}$.

3. Luas Wilayah

Luas Wilayah Kelurahan Meranti Pandak di Kecamatan Rumbai Pesisir adalah $\pm 3,88 \text{ km}^2$ yang Sebagian wilayahnya merupakan lahan gambut. Luas wilayah Kelurahan Meranti Pandak secara rinci dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel IV. 4 : Luas Wilayah Kelurahan Meranti Panda

No	Nama Desa/ Kelurahan	Luas Wilayah (Km^2)	RT	RW
1	Meranti Pandak	2,01 km^2	54	13
2	Limbungan	2,48 km^2	52	12
3	Lembah Sari	9,77 km^2	54	14
4	Lembah Damai	4,32 km^2	38	10
5	Limbungan Baru	2,09 km^2	74	13
6	Tebing Tinggi Okura	134,79 km^2	35	11

Sumber: Monografi Kecamatan Rumbai Pesisir

4. Keadaan Kependudukan

Kelurahan Meranti Pandak mempunyai Jumlah Penduduk sampai dengan April 2020 sebanyak 15.034 jiwa dengan jumlah laki-laki 7.948 jiwa dan jumlah perempuan 7.086 jiwa , dengan rincian sebagai berikut :

Tabel IV. 5 : Keadaan Kependudukan Wilayah Kelurahan Meranti Pandak

No	Golongan Umur	Jumlah Penduduk			Ket
		Jenis Kelamin			
		Laki-Laki	Perempuan	Total(Jiwa)	
1	0-4	104	96	200	
2	5-9	150	120	270	
3	10-14	600	505	1020	
4	15-19	3300	2900	6200	
5	20-24	1128	1005	2133	
6	25-29	1200	1100	2300	
7	30-34	400	350	750	
8	35-39	560	540	1100	
9	40-45	210	205	415	
10	46-49	122	103	225	
11	50-54	65	55	120	
12	55-59	55	50	105	
13	60-64	40	33	73	
14	65-69	25	28	43	
15	70-74	11	05	16	
16	75 keatas	3	1	4	
	Jumlah	7.948	7.086	15.034	

Sumber: Dokumen Kelurahan Meranti Pandak 2020

Selanjutnya peneliti akan memaparkan Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak berdasarkan RW pada tahun 2020 dibawah ini:

Tabel IV. 6 : Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Rukun Warga (RW) Tahun 2020

No	RW	Jiwa/Rw	Ket
1	2	3	4
1	1	1.387	
2	2	1.206	

3	3	1.312	
4	4	1.056	
1	2	3	4
5	5	1.258	
6	6	1.296	
7	7	982	
8	8	958	
9	9	810	
10	10	1.150	
11	11	1.285	
12	12	1.087	
13	13	1.247	
Junlah			

Sumber: Dokumen Kelurahan Meranti Pandak 2020

5. Keadaan Pendidikan

Keadaan dan Jumlah sarana dan prasarana Pendidikan keseluruhan di Wilayah Meranti Pandak Kecamatan Rumbai Pesisir terdiri dari SD, SMA/SMK yang terdapat 5 sekolah SDN diantaranya SDN 122 di RW 09, SDN 165 dan SDN 108 di RW 08, SDN 40 di RW 05 dan SDN 55 di RW 11, serta SMA/SMK yang terdapat di RW 11 adalah MAN.

Tabel IV.7 : Jumlah Penduduk Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Pendidikan Tahun 2020

No	Tidak Sekolah	SD	SMP	SMA	S1	S2	S3	Ket
1	1.719	1.715	2.525	6.139	320	5	2	-

Sumber: Dokumen Kelurahan Meranti Pandak 2020

6. Keadaan Agama

Penduduk di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir ±98% menganut Agama Islam. Yang tersebar diseluruh kelurahan yang ada di wilayah Kecamatan Rumbai Pesisir. Hampir diseluruh Kelurahan dalam wilayah Kecamatan Rumbai Pesisit telah memiliki sarana ibadah dan fasilitas kegamaan lainnya.

Tabel IV. 8 : Jumlah Tempat Ibadah di Kelurahan Meranti Pandak Berdasarkan Tahun 2020

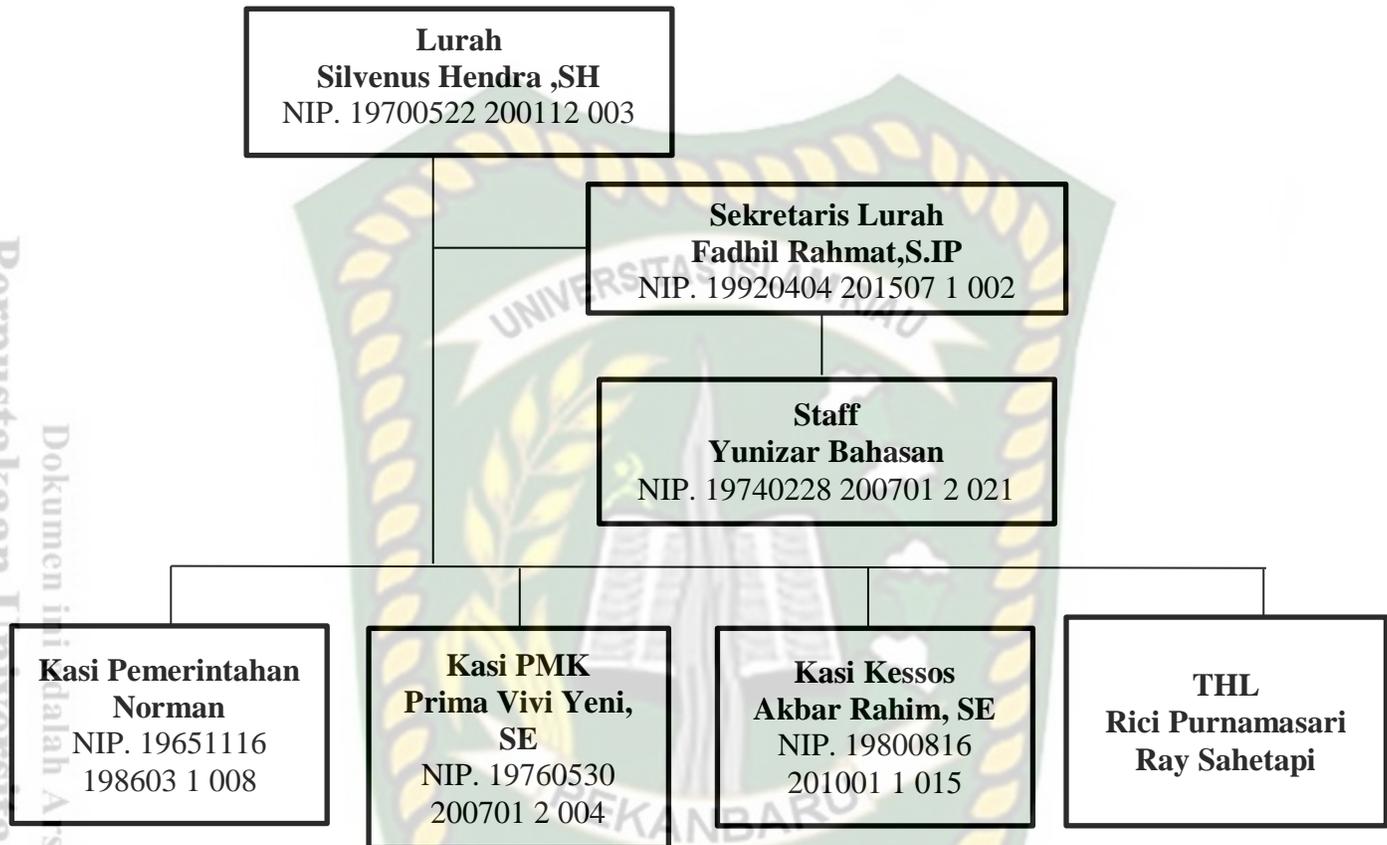
No	Masjid	Surau	Gereja	Pura	Vihara	Lainnya
1	8	12	-	-	-	-

Sumber: Dokumen Kelurahan Meranti Pandak 2020

B. Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Meranti Pandak

Struktur organisasi dalam suatu lembaga instansi memiliki peranan yang penting, dalam organisasi kita dapat melihat bagaimana susunan, tugas dan tanggung jawab masing-masing anggota ataupun kepala sub bagian, dimana setiap anggota harus melaksanakan tugas sebaik mungkin dan yang terlebih dengan penuh tanggung jawab.

Gambar IV.1 Struktur Organisasi Kantor Kelurahan Meranti Pandak.



C. Biodata Pegawai Kelurahan Meranti Pandak

Biodata Pegawai Kelurahan :

- a) Nama : Silvenus Hendra,SH
 TTL : Selat Panjang, 22 Mei 1972
 Pangkat/ Gol :Penata/ III.c
 Jabatan :Lurah Meranti Pandak
 Alamat : Jl. Teluk Leok RT.06 RW.05 Kel Limbungan
- b) Nama : Fadhil Rahmat, S.IP
 TTL : Pekanbaru, 04 April 1992
 Pangkat/ Gol : Penata Muda Tk.I/ III b
 Jabatan :Sekretaris Lurah Meranti Pandak

- Alamat : Jl. Merak No.92 Kel. Tangkerang Tengah
- c) Nama : Norman
 TTL : Cerenti, 16 November 1965
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I / III b
 Jabatan : Kasi Pemerintahan Kel. Meranti Pandak
 Alamat : Jl. Pembina gg. Pembina III Kel, Lembah Sari
- d) Nama : Akbar Rahim, SE
 TTL : Batusangkar, 16 Agustus 1980
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk.I/III b
 Jabatan : Kasi Kesejahteraan Sosial Kel. Meranti Pandak
 Alamat : Jl. Senapelan gg. Senapelan No,4
- e) Nama : Prima Vivi Yeni, SE
 TTL : Pekanbaru, 30 Mei 1976
 Pangkat/Gol : Penata Muda Tk. I/III b
 Jabatan : Kasi PMK Kel. Meranti Pandak
 Alamat : Jl, Jati gg. Damai No. 23a Kel. Kampung Baru
- f) Nama : Yunizar Bahasan
 TTL : Pl. Busuk, 29 Februari 1974
 Pangkat/Gol : Pengatur Tk.I/II d
 Jabatan : Pelaksana
 Alamat : Jl. Muslim II No. 22 Sukajadi, Pekanbaru

BAB V

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Identitas Informan

Dalam sebuah penelitian sebelum masuk ke dalam hasil penelitian dan pembahasan, peneliti memaparkan identitas informan sebagai sumber memperoleh data dan informasi terkait pembahasan dalam penelitian ini. Penelitian sangat penting dijelaskan bahwa Identitas Informan peneliti agar pembacanya merasa yakin bahwa penelitian itu adalah asli dan hasilnya dapat di pertanggung jawabkan karena penelitian yang jelas pastilah telah sesuai dengan subansi penelitiannya.

Dalam penelitian tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat terkait Program Pembangunan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak ini penulis akan menjelaskan mengenai Identitas Informan yang diteliti. Hal-hal yang akan dijelaskan pada pembahasan ini adalah mengenai Jenis Kelamin, Usia, dan Pendidikan Informan.

1. Jenis Kelamin

Dalam suatu organisasi dan kelembagaan perbedaan jenis kelamin tidak ada bedanya lagi, yang mana setiap organisasi perempuan dan laki-laki saling bekerja sama diruang yang lebih luas untuk organisasi dimana mereka bekerja. Pada identitas

informan berdasarkan jenis kelamin ini penulis membedakan antara jenis kelamin laki-laki dan perempuan.

Tabel V. 1 : Jenis Kelamin Informan

No	Jenis Kelamin	Jumlah	Persentase (%)
1	Laki-laki	1	
2	Perempuan	7	
Jumlah		8	100

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Pada tabel V.I dapat diketahui bahwa jenis kelamin responden didominasi oleh perempuan yang berjumlah 7 orang atau 87,5% dan sisanya adalah laki-laki yaitu 1 orang atau 12,5%.

2. Tingkat Pendidikan Responden

Tingkat pendidikan seseorang sedikit banyaknya berpengaruh terhadap sikap, pola pikir, dan wawasan ataupun pengetahuan yang dimilikinya. Biasanya seseorang yang berpendidikan lebih tinggi maka pola pikirnya tentunya semakin matang, semakin dewasa dalam menyikapi berbagai persoalan/ permasalahan dan juga pengetahuan yang dimilikinya juga semakin tinggi.

Tabel V. 2 : Pendidikan Informan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Persentase (%)
1	2	3	4
1	SMA/Sederajat	7	87,5
2	Strata Satu (S1)	1	12,5

1	2	3	4
3	Magister (S2)	-	-
Jumlah		8	100

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Pada tabel V.II dapat dilihat jumlah pendidikan responden yang berpendidikan S1 yang berjumlah 1 orang atau 12,5% sedangkan tingkat pendidikan responden yang berpendidikan SMA/Sederajat 7 orang atau 87,5%. Dengan demikian

3. Tingkat Umur Responden

Selanjut nya ditahap umur dimana untuk mengetahui kemampuan responden dalam memberikan penilaian secara objektif terhadap Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak terkait Program Pembangunan yang diberikan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat itu sendiri, maka pada tabel berikut akan dijelaskan identitas responden berdasarkan umur yaitu :

Tabel V. 3 : Umur Responden

Usia (Tahun)	Jumlah	Persentase (%)
< 20	0	0.00
40-44	2	0.25
50-54	4	0.50
<55	2	0.25
Jumlah	8	100

Sumber: Hasil olahan data lapangan

Berdasarkan tabel V.III diatas diketahui bahwa tingkat umur responden dapat dilihat bahwa tingkat umur 20 tahun keatas hingga 40 tahun tidak ada jumlah

respondennya, sedangkan untuk tingkat umur 40-44 tahun berjumlah 2 orang atau 0.25%, selanjutnya untuk yang berumur 50-54 tahun berjumlah 4 orang atau 0.50% dan untuk diatas 50 an berjumlah 2 orang atau 0.25%. Dengan demikian Analisis dari Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru dalam program pembangunannya dapat mewakili semua kalangan dan berdasarkan umur sehingga dinilai dapat memberikan jawaban yang objektif.

4. Jenis - Jenis Perencanaan Pembangunan Yang Telah disusun Oleh LPM

Kelurahan Meranti Pandak adalah salah satu Kelurahan yang ada di Kecamatan Rumbai Pesisir yang telah dibentuk nya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) yang merupakan mitra kerja pemerintahan kelurahan meranti pandak dibidang pembangunan, menggerakkan partisipatif masyarakat baik yang aktif maupun yang positif untuk melaksanakan dan mengendalikan pembangunan secara terpadu baik yang berasal dari berbagai kegiatan pemerintahan maupun keswadayaan masyarakat dan menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat.

Sebagai gambaran pembangunan yang direncanakan dan dilaksanakan oleh LPM di Kelurahan Meranti Pandak sebagai berikut :

Tabel V. 4 : Program Pembangunan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak

No	Jenis Kegiatan	Biaya	Keterangan
1	2	3	4

1	2	3	4
1	Renovasi Rumah untuk penduduk >60 tahun	Rp. 15.000.000	Selesai
2	Renovasi Rumah untuk penduduk <60 tahun	Rp.17.000.000	Selesai
3	Rumah Layak Huni (bantuan tahap 1) sebanyak 16 unit	Rp. 43.000.000	Selesai
4	Rumah Layak Huni (bantuan tahap 2) sebanyak 3 unit	Rp. 55.000.000	Selesai

Sumber: Ketua LPM Kelurahan Meranti Pandak

B. Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru

Pada bagian ini akan dibahas dan dijelaskan mengenai analisis tanggapan-tanggapan responden yang peneliti teliti dari Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak terhadap indikator-indikator penelitian Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak.

Adapun teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah Model *das Solen-das Sein*, yaitu perbandingan antara yang seharusnya dengan yang senyatanya. Tolak ukurnya adalah *das Sollen* yang dikemukakan didalam buku *Kybernology* oleh Prof. Ndraha (2011;201). Dimana indikator tolak ykur dalam penelitian ini berasal dari

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK), dimana indikator-indikator tersebut adalah :

1. Untuk Menyusun Rencana Pembangunan bersama Masyarakat dan Pemerintah;
2. Dalam Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan terkait hal pembangunan;
3. Memantau pelaksanaan sejauh mana pembangunan tersebut;
4. Menumbuh kembangkan kondisi dinamis dan stabil di masyarakat.

Berikut ini akan peneliti jelaskan hasil tanggapan responden-responden terhadap indikator-indikator penelitian diatas mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak.

1. Menyusun Rencana Pembangunan bersama Masyarakat dan Pemerintah

Di dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, disebutkan bahwa salah satu tugas dari LPM Kelurahan Meranti Pandak adalah Menyusun rencana pembangunan yang ada di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir yang melibatkan masyarakat dan pemerintah.

Untuk indikator Menyusun Rencana Pembangunan bersama Masyarakat dan Pemerintah ini sendiri diajukan 2 item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana LPM

Kelurahan Meranti Pandak dalam melaksanakan tugas Menyusun Rencana Pembangunan. Kemudian pernyataan masyarakat yang menyatakan bahwa terkait penyusunan perencanaan pembangunan bersama masyarakat dan pemerintah diantaranya sebagai berikut :

Menurut LPM tentang indikator pertama bahwa Menyusun rencana pembangunan bersama masyarakat pemerintah berpendapat bahwa :

“Saya selaku Ketua LPM di Kelurahan Meranti Pandak, mengenai penyusunan perencanaan pembangunan yang adek maksud sudah berjalan dengan baik dan sudah terlaksana dengan benar. Ada beberapa pembangunan yang saya dan tim saya bangun sebagai program LPM terkait pembangunan, diantaranya:

1. *Renovasi Rumah untuk penduduk dibawah 60 tahun*
2. *Renovasi Rumah untuk penduduk diatas 60 tahun*
3. *Rumah Layak Huni (bantuan tahap1)*
4. *Rumah Layak Huni (bantuan tahap2)*

Dari yang saya sebutkan sudah jelas bahwa program tersebut sudah berjalan dengan baik dan benar”.

Menurut Ibu Irmayanti selaku Ketua Rt 01 Rw 10 beliau berpendapat:

“Pada masa Bapak Yaslan saya menilai cukup baik, dimana masih harus adanya penyusunan yang harus disusun oleh Lembaga tersebut jangan sampai karena pemabangunan rumah layak huni dan rumah Aladdin sudah selesai,selesai jugala tugas mereka jangan sampai begitu. Karena masih banyak yang harus disusun perencanannya untuk masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak.”

Pernyataan selanjutnya yaitu dari Ibu Yulidar yang menerima program rumah

Aladdin yang terletak di jalan Koramil, dimana beliau berpendapat:

“ Untuk Penyusunan Perencanaan bersama masyarakat dan pemerintah menurut ibu cukup baik karena dalam perencanaan tersebut sudah memadai sesuai dengan yang dibutuhkan namun ibu masih mengeluh mengenai permohonan pembuatan smp didaerah ini karna tidak ada perkembangan sama sekali bahkan

tidak ada respon dari pemerintah sehingga pembangunan di smp disini tidak pernah berjalan”

Dari kedua pendapat informan tersebut ditemukan perbandingan terkait penyusunan perencanaan pembangunan oleh LPM, dimana Ibu Irma berpendapat agar LPM dapat memberikan penyusunan perencanaan pembangunan yang lain untuk masyarakat setempat sedangkan pendapat Ibu Yulidar mengeluhkan terkait pembangunan SMP yang masih dalam tahap permohonan dan masih belum dilaksanakan oleh LPM tersebut.

Dari pendapat responden pertama dan kedua dapat dipahami bahwa Penyusunan Rencana Pembangunan masyarakat bersama pemerintah di nilai cukup baik dikarenakan sebenarnya pihak LPM telah menjalankan dengan sebaik-baiknya sebagaimana yang dipaparkan langsung oleh Ketua LPM Meranti Pandak, dan juga dari pendapat rsponden dimana Ibu Irmayanti berharap agar LPM dapat memberikan penyusunan perencanaan pembangunan yang lain dan lebih dari program yang sekarang agar dapat memberikan manfaat yang baik kepada masyarakat, sedangkan Ibu Yulidar mengeluhkan pembangunan SMP yang masih dalam tahap permohonan dan sampai sekarang belum dilaksanakan.

Hasil observasi terkait indicator pertama terhadap Menyusun Rencana Pembangunan bersama Masyarakat dan Pemerintah sudah dijalankan, dimana program pembangunan yang dilakukan oleh LPM salah satunya terkait pembangunan rumah layak huni dan juga renovasi rumah Aladdin. Masyarakat yang menerima program tersebut sudah cukup puas akan tetapi mereka hanya mengeluhkan pembangunan Sekolah Menengah Pertama di Kelurahan Meranti Pandak tersebut. Pembangunan SMP di Kelurahan Meranti Pandak sampai saat ini belum dijalankan

dan masih dalam tahap pelaporan. Kesimpulan yang peneliti dapatkan dari indicator pertama terhadap Pembangunan bersama Masyarakat dan Pemerintah yang dijalankan LPM sudah **Cukup Baik**.

2. Menggerakkan dan Mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan

Untuk indikator yang kedua ini terkait Menggerakkan dan Mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan hal pembangunan ini sendiri diajukan 2 item pertanyaan, untuk menilai sejauh mana LPM Kelurahan Meranti Pandak dalam menggerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat dalam hal pembangunan. Kemudian terdapat pendapat dari para responden mengenai menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam hal pembangunan.

Menurut LPM itu sendiri tentang terkait menggerakkannya dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan dimana Bapak Yaslan selaku Ketua LPM di Kelurahan Meranti Pandak berpendapat bahwa :

“ Menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat menurut saya selaku Ketua LPM di Kelurahan Meranti Pandak, sudah dilaksanakan dengan baik dimana saya yang melakukan blusukan dari rumah-rumah untuk melakukan pengecekan setiap sore dan juga saya yang terjun langsung dalam hal gotong royong bersama masyarakat yang dilakukan setiap minggunya”.

Menurut Ibu Ermayanti yang menerima program layak huni di Kelurahan

Meranti Pandak dimana beliau berpendapat:

“menurut ibu terkait koordinasi dan menggerakkan terutama dalam hal gotong royong sudah baik dimana setiap minggu diadakan gotong royong di setiap lingkungan di Kelurahan Meranti Pandak ini. Dimana bapak Yaslan lah yang terjun langsung kesini dan menggerakkan kami semua para warga terutama suami ibu yang menjabat sebagai ketua Rw di sini. Setiap seminggu sekali kami mengadakan gotong royong dan juga sosialisasi baik itu hari sabtu ataupun minggu, pokoknya setiap seminggu sekali lah. Kalau tidak ada bapak Yaslan kami sendiri lah yang inisiatif untuk memulai gotong royong ini, setiap warga disini saling membantu tanpa adanya perbedaan rt ataupun rw”.

Selanjutnya pendapat dari Bapak Suwardi terkait mengkoordinasikan dan menggerakkan gotong royong di LPM beliau berpendapat:

“ Sama seperti Ibu Ermayanti kalau untuk gotong royong sudah cukup baik yang dilakukan oleh LPM Kelurahan Meranti Pandak ini. Terkait sarana dan prasarana di Kelurahan Meranti Pandak ini yang kurang disediakan oleh LPM. Bapak mengeluhkan karna kurangnya inisiatif dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Meranti Pandak ini untuk memenuhi kebutuhan masyarakat disini dalam hal sarana dan prasarana. Jangan jauh jauh kita bicara seperti lampu jalan yang di dekat jembatan rumbai tu nak, disitu kan kalau kita lewat disitu kan kurang penerangan lampu jalannya jangan kan kurang sekarang udah mati lampu disitu tu. Dengan kurangnya penerangan dari lampu jalan banyak warga yang mengeluhkan karna sering ditemukan di pinggir jembatan seperti obat terlarang dan alat kontrasepsi disekitaran jembatan tersebut. Taulah kalau tempat gelap itu apapun akan dilakukan anak anak tu dalam artian memanfaatkan jdi makanya banyak ditemukan hal seperti itu”.

Dari kedua pendapat responden terkait menggerakkan dan mengkoordinasikan untuk masyarakat tentang pelaksanaan pembangunan tersebut, dimana Ibu Erma memberikan respon yang positif terhadap menggerakkan dan mengkoordinasikan yang diberikan oleh LPM tersebut. Dikarena setiap minggunya diadakan gotong royong bersama oleh masyarakat dan LPM itu sendiri. Sedangkan Bapak Suwardi mengeluhkan terhadap sarana dan prasarana dimana kurangnya inisiatif dari LPM untuk memperbaiki sarana dan prasarana yang diambil sebagai contoh salah satunya adalah penerangan lampu jalan disekitaran jembatan rumbai yang masih belum diperbaiki hingga sekarang dan juga Bapak Suwardi berharap agar gotong

royong tidak hanya dilakukan di wilayah masyarakat yang menerima program saja tetapi disemua wilayah tanpa adanya pengecualian RT/RW.

Hasil observasi terhadap indikator mengerakkan dan mengkoordinasikan masyarakat terkait pembangunan dalam hal gotong royong memang sudah dilaksanakan satu minggu sekali baik itu hari sabtu ataupun minggu. Masyarakat berinisiatif untuk melakukan gotong royong setiap minggu ada atau tanpa adanya ketua dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut. Dengan adanya gotong royong tersebut terciptalah kesejahteraan masyarakat tanpa adanya perbedaan antar warga. Serta dalam hal gotong royong agar dilakukan disetiap wilayah masyarakat tidak hanya di wilayah masyarakat yang menerima program tersebut. Sarana dan prasarana dimana masyarakat mengeluhkan penerangan lampu jalan yang ada didekat jembatan rumbai tersebut. Setiap adanya pembersihan yang dilakukan warga, mereka menemukan alat kontrasepsi yang ada disekitaran jembatan tersebut. Seharusnya LPM lah yang memenuhi sarana dan prasarana untuk memenuhi kebutuhan agar hal yang kurang baik tersebut dapat dihilangkan dan juga keluhan kesah masyarakat dapat di hapuskan.

Dapat dipahami bahwa kesimpulan yang penulis dapatkan terhadap indicator kedua yaitu tentang Menggerakkan dan Mengkoordinasikan untuk mendorong masyarakat yang ada di indicator ini dalam pelaksanaan pembangunannya **Sangat Baik**. Dimana LPM sendiri sering sekali melaksanakan gotong royong setiap minggunya, tanpa ada pembeda antar warga RT/RW saling membantu dalam melaksanakan gotong royong tersebut. Dalam pelaksanaan gotong royong tentunya

selalu dilaksanakan pengawasan, dan pengawasan tersebut dilakukan oleh Ketua LPM itu sendiri yang terjun langsung dan memantau keadaan disekitar wilayah RT/RW setempat. Pelaksanaan gotong royong dilaksanakan hamper setiap minggunya oleh Ketua LPM Kelurahan Meranti Pandak dan masyarakat sekitar.

3. Memantau Pelaksanaan Pembangunan

Di indikator Memantau Pelaksanaan Pembangunan terdapat 2item yang peneliti ajukan kepada masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak. Berdasarkan hasil teliti yang peneliti lakukan di lingkungan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak. Terdapat pendapat dari para responden yang berpendapat terkait mentau pelaksanaan pembangunan.

Pendapat Ketua LPM terkait Memantau Pelaksanaan Pembangunan:

“Pelaksanaan pemantauan dari kami LPM sendiri saya rasa sudah baik dimana setiap sebulan sekali saya melakukan pemantauan dari pembangunan yang pertama ke pembangunan yang lain. Hal ini saya lakukan agar masyarakat merasa puas dengan kinerja yang diberikan oleh LPM”. Dan juga terkadang setiap sorenya melakukan pengecekan kerumah masyarakat yang menerima program tersebut.

Menurut Ibu Nurmanita yang menerima program rumah layak huni, beliau berpendapat bahwa:

“Pemantauan yang diberikan oleh LPM itu sudah baik dimana setiap sebulan sekali Ketua LPM tersebut yang turun langsung kelapangan dan memantau pengerjaan dari program yang kami terima ini nak. Jadi ibu harap lebih ditingkatkan lagi setiap program nya dan tidak hanya dari program pembangunan rumah layak huni saja yang dipantau pelaksanaannya tetapi setiap program yang diberikan LPM kepada masyarakat harus dipantau”.

Menurut Ibu Elvasusanti yang bekerja freelance menerima program rumah layak huni, beliau berpendapat bahwa:

“ Apa yang di bilang ibu nurmanti sudah benar tetapi menurut ibu alangkah baiknya di bentukla petugas pemantauan yang khusus untuk memantau pembangunan dari lembaga pemberdayaan masyarakat ini. Ibu rasa kurang baik kalau yang terjun langsung untuk memantau adalah Bapak Ketua LPM tersebut, memang disatu sisi baik tetapi alangkah baiknya mereka membentuk tim ataupun petugas yang bertugas untuk memantau. Dalam hal kita dapat mengurangi pengangguran juga jika dibentuk tim pemantauan dan pekerjaan dari bapak ketua lpm tersebut ringan dan kan seperti yang kita tau bahwa seseorang ditempatkan dan bekerja sesuai dengan porsi jabatannya masing masing”.

Dari kedua pendapat tersebut terdapat perbandingan yang peneliti temukan dimana menurut Ibu Nurmanita pemantauan yang diberikan oleh LPM sudah baik dikarenakan yang terjun langsung kelapangan adalah ketua LPM yaitu Bapak Yaslan dan berharap agar lebih ditingkatkan, juga dilakukan pemantauan untuk setiap programnya. Sedangkan Ibu Elvasusanti mengatakan bahwa kurang efektifnya pemantuan jika dilakukan secara langsung oleh LPM seharusnya yang terjun langsung itu adalah tim khusus yang menangani masalah pemantauan itu.

Hasil observasi dari indikator pemantauan poin ketiga ini dapat disimpulkan bahwa dalam hal waktu pemantauan sudah baik dilakukan yakni sebulan sekali dan responden berharap agar lebih ditingkatkan pemantuannya artinya bukan hanya pemantauan untuk pembangunan rumah layak huni saja yang sangat baik dilakukan tetapi untuk program-program lainnya yang dilakukan oleh LPM harus dilakukan sebulan sekali agar hasilnya maksimal. Dan juga responden memberikan tanggapan terkait pembentukan tim petugas yang seharusnya dilakukan secepat mungkin dikarenakan beliau merasa kurang baik aja jika yang melakukan pemantauan adalah ketua dari LPM tersebut yang terjun langsung untuk melakukan pemantauannya.

Dapat dipahami bahwa dari indicator poin ketiga ini terkait Memantau Pelaksanaan Pembangunan yang dilakukan sudah baik yaitu sebulan sekali dan juga masyarakat berharap agar lebih ditingkatkan lagi pemantauannya, artinya bukan hanya utk pembangunan rumah layak huni yang harus dipantau tetapi dari segi semua program LPM yang LPM berikan kepada masyarakat harus dilakukan pemantauan agar pembangunan yang diciptakan berjalan baik dan memberikan kepuasan tersendiri kepada masyarakat. Pemantauan seharusnya dilakukan oleh petugas terkait agar lebih intens dalam memberikan kinerja yang baik terhadap pembangunan tersebut. Untuk pemantauan pelaksanaan pembangunan ini sudah **Cukup Baik** dalam pelaksanaannya, akan tetapi harus lebih ditingkatkan lagi.

4. Menumbuh Kembangkan Kondisi Dinamis Masyarakat

Dalam indikator Menumbuh Kembangkan Kondisi Dinamis Masyarakat terdapat 2 item pertanyaan yang peneliti ajukan kepada responden yang ada di Kelurahan Meranti Pandak terkait program dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat. Dari program pembangunan baik itu pembangunan layak huni, rumah Aladdin dan juga semenisasi yang dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tentunya memberikan kondisi yang baik kepada masyarakat. Dimana yang tadinya mereka tinggal dirumah yang kurang layak untuk ditempati dan akhirnya dengan adanya salah satu program dari LPM yakni rumah layak huni dan rumah alaadin sehingga masyarakat memiliki kebaikan yang tak terhingga.

Menurut Bapak Yaslan selaku Ketua LPM di Kelurahan Meranti Pandak terkait menumbuh kembangkan kondisi dinamis masyarakat, beliau berpendapat bahwa:

“Dengan adanya pembangunan ini tentunya saya yakin memberikan kondisi yang baik untuk masyarakat dan juga memberikan manfaat yang jauh lebih baik terhadap masyarakat yang menerima program ini, dimana mereka mendapatkan tempat yang lebih nyaman untuk ditempati”.

Menurut Ibu Sumarni yang menerima program Aladdin berpendapat bahwa:

“ Menurut ibu ini yang ibu rasakan semenjak rumah ibu di renovasi Aladdin dan menerima program tersebut dari LPM sudah baik. Dimana yang tadinya rumah ibu hampir rata dengan tanah, kayu-kayu nya lapuk semua dan lantai pada retak tapi pas ibu menerima program tersebut direnovasi la rumah ibu dari LPM itu nak. Jujur ibu sangat senang sekali setelah menerima program ini, ibu juga bisa berjualan bikin kedai kecil-kecilan didepan rumah. Alhamdulillah setelah selesai rumah ibu dan kedai ibu, keadaan ibu dan keluarga membaik. Bangun kedai pun dari bekas sisa-sisa kayu rumah ibu yang masih bisa dipakai ibu manfaatkan untuk membangun kedai ini nak. Untuk yang bekerja dalam membangun ini suami ibu sendiri dan alhamdulillah akhirnya terbangun dan kondisi ibu dan keluarga ibu baik”.

Ibu Nita memberikan pendapat terkait program dari LPM, dimana beliau berpendapat bahwa:

“Untuk manfaat terkait keberadaan dari LPM sudah cukup baik dimana dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut dan dengan adanya program yang dibentuk oleh LPM, kondisi kami dikelurahan ini membaik. Dimana yang tadinya rumah mereka tidak layak untuk ditempati alhamdulillah sudah bisa ditempati, mana yang kurang baik rumahnya dapat diperbaiki lagi, dan juga dengan kami merenerima program tersebut kondisi finansial kami sudah cukup membantu, karna Sebagian kecil dari kami memanfaatkan sisa-sisa kayu bekas pembangunan dari LPM kami manfaatkan untuk membangun usaha kecil-kecilan. Ibu juga berharap agar pembangunan yang diberikan oleh LPM dilaksanakan dengan adil agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan manfaat dari program LPM tersebut. Tetapi terkait pembangunan SMP ibu berharap dapat direalisasikan dengan segera. Karna kan dikelurahan ini belum ada smp, yang ada cuman beberapa SD, dan sekolah menengah atas itupun hanya MAN saja. Jadi ibu berharap LPM agar segera melaporkan hal ini kepada pemerintah. Agar amak kami dapat bersekolah dengan baik dan benar jika pembangunan SMP direalisasikan”.

Dari kedua pendapat responden ditemukan perbandingan yang ditemukan oleh peneliti dimana Ibu Sumarni mengatakan bahwa dengan beliau menerima program dari LPM tersebut keadaan membaik, bahkan Ibu Sumarni mendirikan usaha kecil-kecilan didepan rumah dengan memanfaatkan sisa-sisa pembangunan dari rumah yang dibangun oleh LPM. Sedangkan Ibu Nita berharap agar pembangunan yang dilakukan oleh LPM dilaksanakan dengan adil dan jujur. Agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan manfaat dari LPM. Karena dengan adanya pembangunan dari LPM tersebut Sebagian dari kami membangun usaha kecil-kecilan dari sisa pembangunan ini.

Jadi berdasarkan hasil observasi yang penulis teliti terdapat kesimpulan yang dapat dipahami bersama bahwa Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir, Kota Pekanbaru berjalan karena berdasarkan observasi yang peneliti lakukan ada beberapa aspek yang masih belum telaksana dengan baik, seperti perencanaan yang masih belum direalisasikan contohnya pembangunan SMP yang masih dalam tahap permohonan. Dalam hal menggerakkan dan mengkoordinasikan cukup baik juga dimana setiap sekali seminggu diadakan gotong royong bersama dikelurahan tersebut, tentunya hal ini menimbulkan kesejahteraan yang baik terhadap masyarakat. Sarana dan prasaran yang diberikan seharusnya dapat dipenuhi oleh LPM kepada masyarakat, karena banyak masyarakat sekitar yang mengeluh akanb penerangan lampu jalan disekitaran jembatan rumbai, Sebagian dari mereka sering kali menemukan alat kontrasepsi disekitaran jembatan tersebut. Untuk hal pemantauan juga sudah cukup baik, pemantauan dilakukan sebulan sekali dan masyarakat sekitar berharap agar dapat ditingkatkan lagi. Masyarakat juga mengeluhkan terhadap petugas pemantauan yang sampai sekarang belum dibentuk, mereka berharap agar dapat dibentuk secepat mungkin agar pekerjaan dari Ketua LPM tersebut ringan dan

dapat mengurangi angka pengangguran. Keberadaan dari LPM memberikan kondisi dinamis yang cukup baik kepada masyarakat. LPM sendiri membantu dalam hal pembangunan rumah masyarakat yang tadinya tidak layak huni dirubah menjadi layak huni. Masyarakat sangat berterimakasih atas apa yang diberikan oleh LPM kepada mereka. Karena mereka menyadari akan kehadiran dari LPM yang memberikan perekonomian masyarakat sekitar jadi membaik, dimana Sebagian masyarakat yang menerima program tersebut mereka membangun usaha kecil-kecilan didepan rumah mereka dengan memanfaatkan sisa-sisa pembangunan rumah mereka yang diberikan oleh LPM tersebut. Serta masyarakat juga berharap agar pembangunan yang dilakukan oleh LPM Kelurahan Meranti Pandak dapat diperpanjang agar masyarakat yang membutuhkan mendapatkan manfaat dari kehadiran LPM itu sendiri, juga dalam hal pembangunan program dapat dilakukan secara adil dan jujur.

Dapat dipahami bahwa kesimpulan terkait indikator Menumbuh Kembangkan Kondisi Dinamis Masyarakat sudah berjalan dengan **Cukup Baik**, dimana masyarakat dapat terbantu dalam segi perekonomian. Dikarenakan masyarakat memiliki inisiatif dimana mereka membangun usaha kecil-kecilan seperti membuat kedai didepan rumah mereka dari sisa-sisa pembangunan tersebut. Akan tetapi LPM Kelurahan Meranti Pandak agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dalam hal segi sarana dan prasarana juga tidak hanya dalam hal pembangunan saja yang dilakukan

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisa yang telah penulis lakukan mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Tentang Pelaksanaan Tugas baik dari segi Programnya, makanya penulis dapat mengambil kesimpulan dan saran sebagai pelengkap akhir dari penyelesaian skripsi ini sebagai bahan masukan dan pertimbangan bagi pihak yang membutuhkan informasi khususnya menyangkut Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir.

Berdasarkan hasil analisis yang penulis lakukan, maka dapat diambil kesimpulan bahwa Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, tentang Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan terkait tentang Program, terkhusus di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir sudah terlaksana dengan baik.

Adapun kesimpulan dari penelitian mengenai Analisis Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak, Kecamatan Rumbai Pesisir adalah sebagai berikut

1. Pelaksanaan Tugas Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak tentang Program Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah terlaksana dengan baik, hal ini sebagaimana telah penulis paparkan pada bab pembahasan hasil penelitian diatas, dimana masyarakat yang menerima program tersebut merasa puas dan adil dengan program dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut terkait pembangunan dari Rumah Renovasi, Rumah Aladdin dan program-program lainnya.
2. Masyarakat menyadari bahwa dengan adanya Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sebagai mitra pemerintah mendapatkan manfaat dengan kehadiran dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut dengan membantu mereka dan mempermudah mereka dari segi pembangunan, dan juga pemenuhan fasilitas sarana dan prasarana yang ada.

Dikatakan baik karena dilihat dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat sudah melakukan sosialisasi terkait pembangunan, melakukan pembangunan terhadap masyarakat yang membutuhkan dan juga pembangunan fasilitas sarana prasarana yang ada di Kelurahan Meranti Pandak.

Akan tetapi masih ada pembangunan yang harus dilakukan oleh Lembaga Pemberdayaan Masyarakat tersebut misalnya pembangunan terkait Sekolah Menengah Pertama di Kelurahan Meranti Pandak yang sedang berjalan.

B. SARAN

1. Lembaga Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan Meranti Pandak diharapkan agar melakukan sosialisasi kepada masyarakat terkait pembangunan yang menjadi salah satu program dari Lembaga Pemberdayaan itu sendiri agar tidak terjadinya kesalah pahaman terkait pembangunan dan menyelaraskan pemahaman bersama.
2. Bagi masyarakat yang belum mendapatkan program pembangunan dari Lembaga Pemberdayaan Masyarakat agar tetap mengikuti aturan dan alur dari Peraturan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Hendropuspito. 2001. *Sosiologi Sistematis*. Jakarta. Kanisius.
- Khasan Effendy, 2010. *Memadukan Metode Kuantitatif dan Kualitatif*, CV. Indra Prahasta. Bandung;
- Ndraha, Taliziduhu. 2005. *Metode Ilmu Pemerintahan*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Raho Bernard. 2007. *Teori Sosiologi Modern*. Penerbit . Prestasi Pustaka Publisher.
- Sunyoto Usman. 2004. *Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat*, Yogyakarta : Pustaka Pelajar.
- Yusri Munaf, 2016. *Hukum Administrasi Negara*, Jln. KH nasution No 113, Pekanbaru:
- Effendy, Uchjana, Onong. 2011. *Ilmu Komunikasi Teori dan Praktek*. Bandung: Remaja Rosdakarya Offset.
- Suryanto. 2015. *Pengantar Ilmu Komunikasi*. Bandung: CV Pustaka Setia
- Nugroho, D Riant, 2008. *Analisis Kebijakan Negara*. Jakarta: Elexmedia.
- Thoha, Mifta, 2011. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Torang, Syamsir, 2013. *Organisasi dan Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Soekanto, Soejono, 2001, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: PT. Hajimagung
- Ruliana, Poppy, 2016, *Komunikasi Organisasi*, Jakarta: Rajawali pers
- Handoko, Hani, 2003, *manajemen*, Yogyakarta: BPFE-Yogyakarta.
- Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Manajemen Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama
- Suharto, Edi, 2010. "Membangun Masyarakat Memberdayakan Rakyat". Refika Aditama, Bandung
- Soetomo, 2009. "Pembangunan Masyarakat". Pustaka Belajar, Yogyakarta
- Mardikanto, T., dan Soebiato, P. (2015). *Pembedayaan Masyarakat Dalam Perspektif Kebijakan Publik*. Bandung :Alfabeta.

Heriyanti, H. (2015). *Komunikasi Pembangunan Memberikan Peranan Penting Bagi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*. Bandung.

Dr. H. Yusri Munaf, M. Hum. (2015). *Hukum Administrasi Negara*. Pekanbaru : Marpoyan Tujuh Publishing.

Ndara, Talizuduhu, 2003. *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prof. Mirian Budiardjo (2008). *Dasar-dasar Ilmu Politik*. Jakarta : Gramedia Pustaka Utama.

Sugiyono (2012), *Metodelogi Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta

Syafiie, Inu Kencana, 2011, *Pengantar Ilmu Pemerintahan*, Bandung: PT. Refika Aditama

Ndara, Talizuduhu, 2003. *Kybernology*. Jakarta: Rineka Cipta.

Prof. Dr. Emzir, M.Pd. 2010, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Analisis Data*. Surabaya : Rajawali Press.

Khasan Effendi, 2009. *Memadukan Metode, Kualitatif dan kuantitatif*. Bandung: CV Pustaka Setia

Dokumentasi :

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 5 Tahun 2007 *Tentang Pedoman Penataan Lembaga Kemasyarakatan*.

Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 9 Tahun 2005 *Tentang Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK)*.

Fokus media, 2015. Undang-Undang pemerintahan Daerah, Jln. Melati Mekar No 02,
Bandung;



Dokumen ini adalah Arsip Milik :
Perpustakaan Universitas Islam Riau